



#2023
#WHP THRIVE

ASEAN
INDONESIA
2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2021. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah serta bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama Tahun 2023, dari aktivitas kegiatan yang telah menjadi target pada tahun tersebut. Dalam Laporan Kinerja ini, juga menjabarkan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Saran dan masukan dalam rangka perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Banda Aceh, 15 Januari 2024

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya

Perikanan dan Kelautan Lampulo



Sahono Budiarto, S.St.Pi, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2023. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, pada tahun 2023 terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang harus dilaksanakan oleh UPT Pangkalan PSDKP Lampulo sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Hasil capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 106,38 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik).

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2023 sebesar Rp 27.808.540.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 27.759.675.417 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah). Persentase realisasi anggaran diperoleh sebesar 99,82%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAKTI.

Melalui Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 ini, diharapkan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di Tahun berikutnya, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus UPT Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan Sasaran Kegiatan selama Tahun 2023 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Laporan ini merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (*obligation to answer*) tentang apa yang sudah diamanatkan kepada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai selama dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang telah diterima.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, dan evaluasinya.

C. Aspek Strategis dan Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 (lima) Strategi Ekonomi Biru sebagai langkah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan dunia, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Target perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia;
- 2.) Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota berdasarkan zonasi;
- 3.) Pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- 4.) Menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik;
- 5.) Program “Bulan Cinta Laut” dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal.

Aspek Strategis yang dapat menunjang pencapaian kinerja di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Terjadi peningkatan jumlah dan ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik.
- 2.) Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo yang luas, sehingga pelaku usaha yang diawasi setiap tahunnya mengalami variasi.
- 3.) Penysadartahuan terhadap POKMASWAS sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Perikanan Tangkap

Isu aktual pada bidang perikanan tangkap, antara lain sebagai berikut:

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b. Kegiatan pembongkaran ikan tidak pada pelabuhan pangkalan yang menyebabkan tidak terdatanya hasil tangkapan dengan tepat sehingga tidak sesuai dengan program penangkapan ikan terukur.

- c. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti di wilayah Aceh Barat, Simeulue, Sibolga, Sumatera Barat, dan Bengkulu;
- d. Masih minimnya sarana dan prasarana pengawasan di laut;
- e. Kurangnya SDM Pengawas Perikanan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan pengawasan penangkapan ikan;
- f. Adanya konflik antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna alat tangkap trawl di Bengkulu dan Aceh Barat.

2. Bidang Perikanan Budidaya

Isu aktual terkait bidang perikanan budidaya adalah belum terdapat kejelasan terkait perizinan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belum semua pelaku usaha pembudidayaan ikan menerapkan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Isu yang diambil dari bidang pengolahan hasil perikanan adalah IPAL yang dimiliki oleh pelaku usaha pengolahan hasil perikanan belum memenuhi standar IPAL yang seharusnya. Masih terdapat pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro kecil yang belum menerapkan standar kelayakan pengolahan.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Isu aktual pada bidang pemasaran hasil perikanan adalah belum terdatanya hasil perikanan yang terdistribusikan dan daerah distribusi hasil perikanan. Adanya dugaan beredarnya ikan yang merupakan komoditas impor pada wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo yang tidak sesuai peruntukan.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Isu aktual pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain sebagai berikut:

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan setrum;
- b. Alih fungsi lahan mangrove;
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir, laut, dan perairan darat;
- d. Adanya isu penjualan pulau – pulau kecil;
- e. Belum dilengkapinya PKKPR oleh para pelaku usaha.

6. Bidang Kawasan Konservasi

Masih banyak pelaku usaha di kawasan konservasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dan memasuki Zona inti dari kawasan konservasi.

7. Bidang Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah masih belum dilengkapi dengan PKKPRL maupun KKKPRL.

D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo

1. Tugas Pokok dan Fungsi

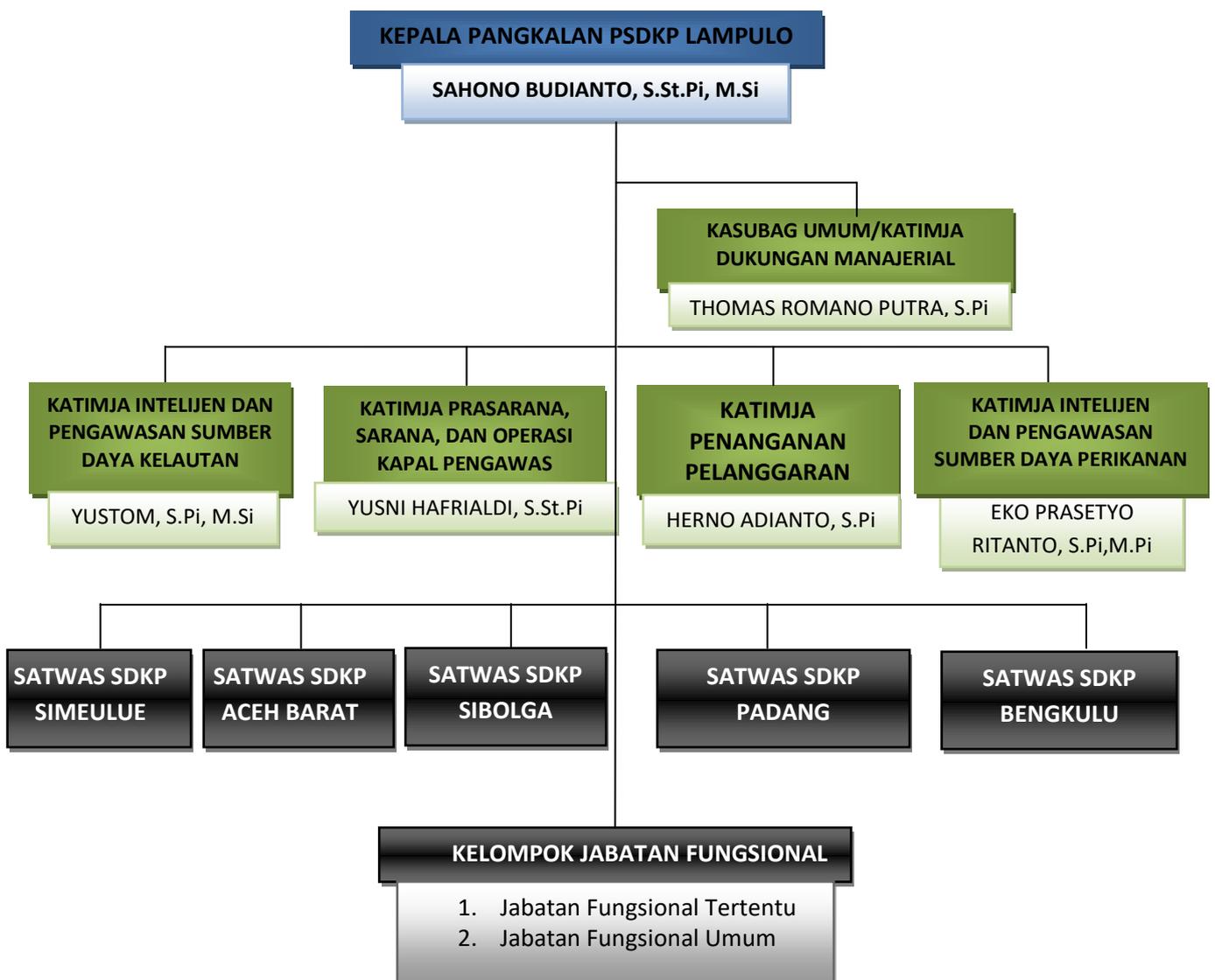
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Pangkalan membawahi Kepala Sub Bagian Umum dengan anggota kelompok Ketua Tim Kerja yang terdiri dari jabatan fungsional tertentu (JFT) dan kelompok jabatan fungsional umum (JFU). Penunjukkan Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja dibuktikan dengan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor: B.1191/PSDKPLan.1/KP.440/X/2023 tentang Pembentukan Tim Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tanggal 5 Oktober 2023. Adapun gambaran terkait Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo

Struktur organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Kepala Pangkalan

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Pangkalan, yaitu merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Sub Bagian Umum, yaitu melakukan melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keluarga, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik Negara dan perlengkapan.

c) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional

Koordinator Pelaksana Fungsional, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

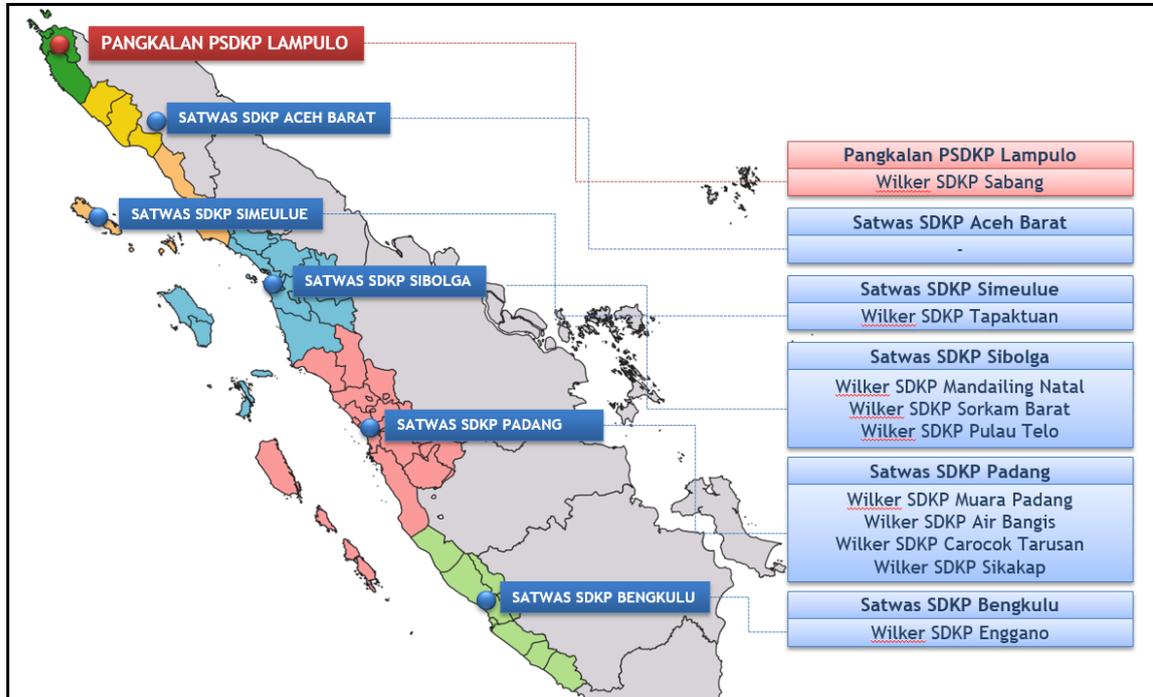
d) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

e) Satuan PSDKP

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dibentuk satuan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan Pengawasan PSDKP, merupakan unit organisasi non-struktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Koordinator Satuan Pengawasan.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan PSDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah di bentuk Satuan PSDKP dan Wilayah Kerja PSDKP di bawah koordinasi UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, yang meliputi 5 Satuan PSDKP dan 10 Wilayah Kerja PSDKP, yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2023 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi Unit Kerja serta data umum UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis UPT Pangkalan PSDKP Lampulo untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

4. Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2023 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

5. Bab V Lampiran

Menyajikan lampiran yang berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Awal Tahun), Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Revisi Desember), dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Kerja; dan (2) Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balance Score Cards* (BSC).

A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024

Renstra disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020 – 2024.

Adapun proses Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015 – 2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterliatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP.

Berdasarkan arah kebijakan PSDKP tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran Kegiatan tersebut digunakan juga untuk Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun Budaya Kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan Kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun Pola Karir PNS Ditjen. PSDKP;
 - d. Meningkatkan Jumlah dan Sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun Sarana Pengawasan (Kapal Pengawas, Speed Boat dan Sarana Pengawasan lainnya);
 - b. Membangun Infrastruktur Pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan Pemeliharaan Kapal Pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan Kelembagaan Pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi Bersama Pengawasan di Laut;
 - b. Pertukaran Data;
 - c. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi PSDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan Lembaga Internasional dan Regional dalam pemberantasan *IUU Fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*);

- d. Menerapkan metode *auditing* dalam PSDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung PSDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”;
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pangkalan PSDKP Lampulo senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU Fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Pangkalan PSDKP Lampulo akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

2) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3) Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta Penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khasanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati,
- (2) Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka
- (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

4) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data. Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan melalui:

- (1) Optimalisasi peranan *Regional Monitoring Center* (RMC) Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan,
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan berbasis digital,
- (3) Pemanfaatan *Information Technology Forensic* (teknologi forensik digital) dan *intelligent open source* untuk pengembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pangkalan PSDKP Lampulo sendiri memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada Tahun 2023. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka sesuai jenjang hirarki UPT Pangkalan PSDKP Lampulo diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja.

Pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami 1 (satu) kali Revisi Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023 disahkan pada tanggal 17 Januari 2023 mengalami Revisi yang disahkan pada tanggal 5 Desember 2023. Rincian perubahan target pada Perjanjian Kinerja, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Rincian Perubahan Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Nama IKU	Target Awal	Revisi Target
ISK5.1.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	89	93,75

Tabel 2.2. Rincian Indikator Kinerja Baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Nama IKU	Target
ISK1.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan (%)	100
ISK3.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan	100
ISK4.1.1	Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (%)	80

No.	Nama IKU	Target
ISK4.2.1	Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (%)	93
ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	75
ISK5.1.6	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	90
ISK5.1.9	Jumlah inovasi yang dihasilkan (Inovasi)	1
ISK5.1.13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	89

Tabel 2.3. Rincian Indikator Kinerja yang Tidak Digunakan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Nama IKU	Target
ISK1.2.3	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas	100
ISK1.3.1	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
ISK2.1.1	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100
ISK2.2.1	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (%)	100
ISK3.1.1	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100
ISK3.2.1	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan (%)	100
ISK4.1.1	Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
ISK4.1.2	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
ISK4.1.3	Indeks penyelesaian tindak lanjut penganan sanksi administratif (indeks)	80
ISK4.2.1	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	93
ISK5.1.3	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	75
ISK5.1.6	Penilaian mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	80,05
ISK5.1.9	Inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1
ISK5.1.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	93,75

Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1.1	Terselenggaranya Pengawasan Sistem Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	ISK1.1.1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	80
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	ISK1.2.1	Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas (Indeks)	87,6
		ISK1.2.2	Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas (Indeks)	87,6
		ISK1.2.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK1.3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	ISK1.3.1	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK2.1	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	ISK2.1.1	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	100
SK2.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	ISK2.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK3.1	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	ISK3.1.1	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	100
SK3.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	ISK3.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan	ISK4.1.1	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Perikanan yang Tuntas	ISK4.1.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
		ISK4.1.3	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	80
SK4.2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	ISK4.2.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	75
		ISK5.1.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
		ISK5.1.5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	78
		ISK5.1.6	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	80,05
		ISK5.1.7	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		ISK5.1.8	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21
		ISK5.1.9	Inovasi yang Dihasilkan (Inovasi)	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		ISK5.1.10	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	92
		ISK5.1.11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	77,5
		ISK5.1.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	77,5
		ISK5.1.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	93,75
		ISK5.1.14	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	82

Pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami 12 (dua belas) kali Revisi Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5. Rincian Revisi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023

No.	REVISI KE-	PENJELASAN
1	<u>KE-1</u> Tema Revisi : Usulan Automatic Adjustment Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-1 Tanggal 27 Desember 2022 DS:4529-8840-7917-7172 Surat Usulan Revisi: B.947/DJPSDKP/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022.	Rincian pada revisi kali ini adalah Automatic Adjustment dalam catatan halaman IV DIPA A (blokir) sebesar Rp. 2.447.051.000 (Belanja Barang (52) sebesar Rp.1.660.501.000 , dan Belanja Modal (53) sebesar Rp.786.550.)
2	<u>KE-2</u> Tema Revisi : Pemutakhiran KPA Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-2 Tanggal 19 Januari 2023 DS:4529-8840-7917-7172 Surat Usulan Revisi: B.94/PSDKPLan.1/RC.110/I/2023 Tanggal 19 Januari 2023.	Rincian pada revisi kali ini adalah pergeseran anggaran jenis belanja untuk memenuhi kebutuhan seperti biaya jaga sandar sebesar Rp.5.880.000 ,uang makan PNS sebesar Rp.14.764.000

No.	REVISI KE-	PENJELASAN
3	<p><u>KE-3</u> Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-3 Tanggal 21 Februari 2023 DS:8799-1050-9107-5525 Surat Usulan Revisi: B. 64/DJPSDKP/RC.420/II/2023 Tanggal 6 Februari 2023.</p>	<p>Rincian pada revisi kali ini adalah buka blokir pengadaan kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp.585.000.000</p>
4	<p><u>KE-4</u> Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-4 Tanggal 27 Maret 2023 DS:6015-2427-8219-9851 Surat Usulan Revisi: B. 364/PSDKPLan.1/RC.110/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023.</p>	<p>Rincian pada revisi kali ini adalah Pergeseran Anggaran Antar jenis Belanja, Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA untuk menunjang kegiatan operasional Kapal Pengawasan Kelautan dan Perikanan HIU 3212 pada Pangkalan PSDKP Lampulo, diperlukan pengadaan perlengkapan berupa: Sprei, tali tambat labuh, dampira dll yang bersumber dana anggaran belanja modal perlengkapan yang rencana pergeseran anggaran antar jenis belanja dari Belanja Modal (53) ke Belanja Barang (52) sebesar Rp.57.000.000 sehingga sisa Belanja Modal menjadi Rp.80.000.000.</p>
5	<p><u>KE-5</u> Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-5 Tanggal 11 April 2023 DS:4775-3050-0052-5758 Surat Usulan Revisi: B.400/PSDKPLan.1/RC.110/IV/2023 Tanggal 10 April 2023.</p>	<p>Rincian pada revisi kali ini adalah Terapat kesalahan Akun Belanja Modal untuk Kegiatan Jaringan Listrik yang semula 536 seharusnya 534 sehingga muncul Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB pada Halaman depan SAKTI (terlampir), dari permasalahan tersebut sehingga kami mengajukan revisi untuk selanjutnya akan dilakukan Ralat SPM sebesar Rp. 36.375.000.</p>
6	<p><u>KE-6</u> Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-6 Tanggal 5 Mei 2023 DS:4775-3050-0052-5758 Surat Usulan Revisi: B.392/DJPSDKP/RC.420/V/2023 Tanggal 2 Mei 2023.</p>	<p>Rincian pada revisi kali ini adalah Penyesuaian tagging Automatic Adjustment (AA) dalam catatan halaman IV DIPA A (blokir) sebesar Rp.554.958.000.</p>

No.	REVISI KE-	PENJELASAN
7	<p><u>KE-7</u> Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-7 Tanggal 11 Mei 2023 DS:9700-0240-1931-3355 Surat Usulan Revisi: B.542/PSDKPLan.1/RC.110/V/2023 Tanggal 10 Mei 2023.</p>	<p>Rincian pada revisi kali ini adalah Pemutakhiran data revisi POK,Perubahan RPD (Halaman III DIPA) dan Pergeseran Anggaran antarjenis Belanja</p>
8	<p><u>KE-8</u> Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-8 Tanggal 12 Juni 2023 DS:9700-0240-1931-3355 Surat Usulan Revisi: B.668/PSDKPLan.1/RC.110/VI/2023Tanggal 9 Juni 2023.</p>	<p>Rincian pada revisi kali ini adalah Pemutakhiran data revisi POK,Perubahan RPD (Halaman III DIPA)</p>
9	<p><u>KE-9</u> Tema Revisi : Pemutakhiran KPA Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-9 Tanggal 13 Juni 2023 DS: 9700-0240-1931-3355 Surat Usulan Revisi: B.678/PSDKPLan.1/RC.110/VI/2023 Tanggal 13 Juni 2023.</p>	<p>Rincian pada revisi kali ini adalah Pemutakhiran data revisi POK berupa pergeseran anggaran belanja barang untuk memenuhi kebutuhan belanja lampu jalan kantor pangkalan psdkp lampulo sebesar Rp.15.400.000</p>
10	<p><u>KE-10</u> Tema Revisi : Pemutakhiran Data POK Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-10 Tanggal 22 Juni 2023 DS: 9700-0240-1931-3355 Surat Usulan Revisi: B.712 /PSDKPLan.1/RC.110/VI/2023 Tanggal 22 Juni 2023.</p>	<p>Rincian pada revisi kali ini adalah Pemutakhiran dara revisi POK berupa ralat akun semula 521253 mejadi 523131 penerangan lampu jalan senilai Rp.16.880.000</p>
11	<p><u>KE-11</u> Tema Revisi : Revisi Anggaran (PA) Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-11 Tanggal 19 Juli 2023 DS: 8031-3996-6947-3653</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergeseran anggaran antar-KRO antar Satker,adalah pertukaran blokir automatic adjustment untuk memenuhi kebutuhan anggaran kontrak tahun jamak pengadaan kapal pengawas kelas II; 2. Pergeseran anggaran dalam satu KRO antar

No.	REVISI KE-	PENJELASAN
	Surat Usulan Revisi: B.681/DJPSDKP/RC.420/VII/2023 Tanggal 11 Juli 2023.	Satker, adalah pergeseran dari Satker Pangkalan PSDKP Batam pada RO 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas sebesar Rp.172.532.000 dan RO 2350.RCG.001 Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat sebesar Rp.43.000.000 ke Pangkalan PSDKP Lampulo pada RO 2350.RCG.001 Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat sebesar Rp.215.532.000; 3. Pergeseran anggaran antar RO-PN, adalah Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) KRO antar RO PN dari 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas ke 2350.QHD.003 Operasi Speedboat Pengawas sebesar Rp86.264.000. Pergeseran anggaran ini bersumber dari langganan listrik darat yang tidak terpakai sehingga tidak berpengaruh terhadap volume RO Operasi Kapal Pengawas. Pergeseran ini digunakan untuk penambahan biaya operasional speedboat dalam rangka penambahan 1 unit speedboat Barramundi 01 ke Pangkalan PSDKP Lampulo. Risiko jika pergeseran anggaran tidak dilaksanakan, maka target volume operasi speedboat Barramundi 01 sebesar 12 hari operasi tidak tercapai. Hal ini akan berdampak terhadap pencapaian target hari operasi speedboat secara nasional sebanyak 30 hari.
12	<u>KE-12</u> Tema Revisi : Revisi Kanwil Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-12 Tanggal 22 Agustus 2023 DS: 8031-3996-6947-3653 Surat Usulan Revisi: B.942/PSDKPLan.1/RC.110/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023.	Rincian pada revisi kali ini adalah Optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas berupa pemenuhan belanja pegawai PPPK untuk 1(satu) Bulan yang sumber dari sisa anggaran Tunkin PNS ke-13 yang tersisah sebesar Rp.60.028.000 serta Perubahan RPD Halaman III DIPA.
13	<u>KE-13</u> Tema Revisi : Revisi Anggaran (DJA) Nomor DIPA : SP DIPA-	Pergeseran anggaran antar satker antar Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Pergeseran dilakukan dalam rangka

No.	REVISI KE-	PENJELASAN
	032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-13 Tanggal 29 Agustus 2023 DS: 0265-6315-2554-7716 Surat Usulan Revisi: B.789/DJPSDKP/RC.420/VIII/2023 Tanggal 21 Agustus 2023.	pemenuhan Belanja Operasional Pegawai (Belanja Pegawai PPPK) dari Sekretariat Ditjen PSDKP ke UPT Lingkup Ditjen PSDKP sebesar Rp4.029.941.000, Adapun penambahan untuk UPT Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar Rp.690.936.000.
14	<u>KE-14</u> Tema Revisi : Pemutakhiran Data POK Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-14 Tanggal 14 September 2023 DS: 0265-6315-2554-7716 Surat Usulan Revisi: B.1065 /PSDKPLan.1/RC.110/IX/2023 Tanggal 13 September 2023.	Rincian pada revisi kali ini adalah Pemutakhiran data revisi POK berupa pergeseran anggaran jenis belanja yang sama dalam 1(satu) RO meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. RO-PN 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas senilai Rp.36.200.000; 2. RO 2351.BCE.U02 Perkara TPKP Sedang yang Ditangani senilai Rp.48.000.000; 3. RO 2352.QIC.001 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya senilai Rp.6.000.000; 4. RO 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran senilai Rp.198.000; dan 5. RO 2355.EBC.954 Layanan Manajemen SDM senilai Rp.1.650.000 Pergeseran anggaran untuk meningkatkan kualitas belanja kementerian/Lembaga.
15	<u>KE-15</u> Tema Revisi : Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP TA 2023 Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-15 Tanggal 15 Oktober 2023 DS: 4430-2154-2020-1889 Surat Usulan Revisi: B.969/DJPSDKP/RC.420/X/2023 Tanggal 5 Oktober 2023.	RO Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membenatu pengawasan SDKP pada 11 (sebelas) satker UPT lingkup Ditjen PSDKP total sebesar Rp2.263.770.000,- untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan bimbingan teknis POKMASWAS. Satker Pangkalan PSDKP Lampulo memperoleh tambahan sebesar Rp. 136.365.000
16	<u>KE-16</u> Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-16 Tanggal 19 Oktober 2023 DS: 9575-5007-8854-7152 Surat Usulan Revisi:	1. Rincian Output Usaha Sumber Daya Kelautan yang diperiksa kepatuhannya memerlukan dukungan pembiayaan sebesar Rp. 1.119.394.000 sebagaimana RAB terlampir. Pada pelaksanaan tahun anggaran 2023, terdapat pagu anggaran yang diblokir kode 2 sebesar Rp. 310.069.000 dan blokir kode 9 (Automatic Adjustment) sebesar Rp.

No.	REVISI KE-	PENJELASAN
	B.994/DJPSDKP/RC.420/X/2023 Tanggal 16 Oktober 2023.	<p>289.094.000. Selanjutnya pada bulan Mei 2023 dilakukan rekomposisi blokir kode 9 (AA) yang berasal dari blokir 2 sebesar Rp. 223.198.000, sehingga blokir kode 2 menjadi Rp.87.708.000 dan blokir kode 9 (AA) menjadi sebesar Rp. 512.292.000. Selanjutnya pada bulan Oktober dilakukan realokasi blokir kode 9 (AA) ke BA BUN sebesar Rp.512.292.000 sehingga blokir kode 9 (AA) menjadi Rp. 0 dan blokir 2 (ABT) menjadi Rp. 87.708.000 Sehingga anggaran yang efektif dapat digunakan pada Rincian Output Usaha Sumber Daya Kelautan yang diperiksa keputuhannya sebesar Rp. 519.394.000;</p> <p>2. Rincian Output Unit Usaha Sektor Perikanan yang diawasi keputuhannya memerlukan dukungan pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000.000, sebagaimana RAB terlampir. Pada pelaksanaan tahun anggaran 2023, terdapat pagu anggaran yang diblokir kode 2 sebesar Rp. 100.000.000 dan blokir kode 9 (<i>Automatic Adjustment</i>) sebesar Rp. 821.460.000. Selanjutnya pada bulan Juni 2023 dilakukan rekomposisi blokir kode 9 (AA) yang berasal dari blokir 2 sebesar Rp. 100.000.000, sehingga blokir kode 2 menjadi Rp.0 dan blokir kode 9 (AA) menjadi sebesar Rp. 921.460.000. Selanjutnya pada bulan Oktober 2023 dilakukan realokasi blokir kode 9 (AA) ke BA BUN sebesar Rp. 921.460.000 sehingga blokir kode 9 (AA) menjadi sebesar Rp.0 dan blokir kode 2 (ABT) menjadi sebesar Rp.0. Sehingga anggaran yang efektif dapat digunakan pada Rincian Output Unit Usaha Sektor Perikanan yang diawasi keputuhannya sebesar Rp. 578.540.000.</p> <p>Revisi kali ini adalah realokasi AA ke BA BUN sebesar Rp.1,433,752,000.</p>

No.	REVISI KE-	PENJELASAN
17	<p><u>KE-17</u> Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-17 Tanggal 27 Oktober 2023 DS: 3643-8401-7509-0870 Surat Usulan Revisi: B.1007/DJPSDKP/RC.420/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023.</p>	<p>Pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam satu RO, berupa belanja 51 ke belanja 52 operasional perkantoran sejumlah Rp.500,000,000 meliputi: pemeliharaan gedung kantor, pemenuhan pakaian dinas pegawai, pembayaran tagihan listrik, pembayaran tagihan internet, pencetakan bahan publikasi, kebutuhan kantor sehari-hari, dan pengurusan penerbitan sertifikat IMB gedung kantor lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dsb.</p>
18	<p><u>KE-18</u> Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-18 Tanggal 1 November 2023 DS: 2036-6403-6588-1251 Surat Usulan Revisi: B.1007/DJPSDKP/RC.420/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023.</p>	<p>Buka blokir ABT Pangkalan PSDKP Lampulo TA 2023 dan pergeseran anggaran antar KRO, antar RO-PN dalam satu program satker Pangkalan PSDKP Lampulo. Pergeseran anggaran sebesar Rp.149.073.000,- dalam rangka penguatan operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan;</p> <p>Revisi dalam hal pagu anggaran berubah antar satker lingkup Ditjen PSDKP sebesar Rp. 1.450.927.000.-;</p> <p>Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada satker Pangkalan PSDKP Lampulo</p>
19	<p><u>KE-19</u> Tema Revisi : Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-19 Tanggal 20 November 2023 DS: 2036-6403-6588-1251 Surat Usulan Revisi: B.1007/DJPSDKP/RC.420/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023.</p>	<p>Rincian pada revisi kali ini adalah Pemutakhiran data revisi POK berupa pergeseran anggaran belanja barang untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja Satker.</p>

No.	REVISI KE-	PENJELASAN
20.	<p><u>KE-20</u> Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-20 Tanggal 30 November 2023 DS: 4770-0297-0214-6740 Surat Usulan Revisi: B.1101/DJPSDKP/RC.420/XI/2023 Tanggal 27 Oktober 2023.</p>	<p>Pergeseran anggaran antar KRO dalam satu satker: pergeseran anggaran Satker Pangkalan PSDKP Lampulo pada 2355.CAN.001 KRO Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp553.000 menjadi 2355.EBA.962 KRO Layanan Umum.</p>
21	<p><u>KE-21</u> Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-21 Tanggal 13 Desember 2023 DS: 4770-0297-0214-6740 Surat Usulan Revisi: B.1668/PSDKPLan.1/RC.110/XII/2023 Tanggal 13 Desember 2023.</p>	<p>Rincian pada revisi kali ini adalah Pemutakhiran data revisi POK berupa pergeseran anggaran belanja barang untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja Satker.</p>
22	<p><u>KE-22</u> Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-22 Tanggal 18 Desember 2023 DS: 4770-0297-0214-6740 Surat Usulan Revisi: B.1679/PSDKPLan.1/RC.110/XII/2023 Tanggal 18 Desember 2023.</p>	<p>Rincian pada revisi kali ini adalah Pemutakhiran data revisi POK berupa pergeseran anggaran belanja barang untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja Satker.</p>
23	<p><u>KE-23</u> Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2023 Revisi Ke-23 Tanggal 27 Desember 2023 DS: 4770-0297-0214-6740 Surat Usulan Revisi: B.1706/PSDKPLan.1/RC.110/XII/2023 Tanggal 27 Desember 2023.</p>	<p>Rincian pada revisi kali ini adalah Pemutakhiran data revisi POK berupa pergeseran anggaran belanja barang untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja Satker.</p>

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian IKU dan IKM dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja. Selanjutnya, nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi *Kinerjaku* yang merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB III

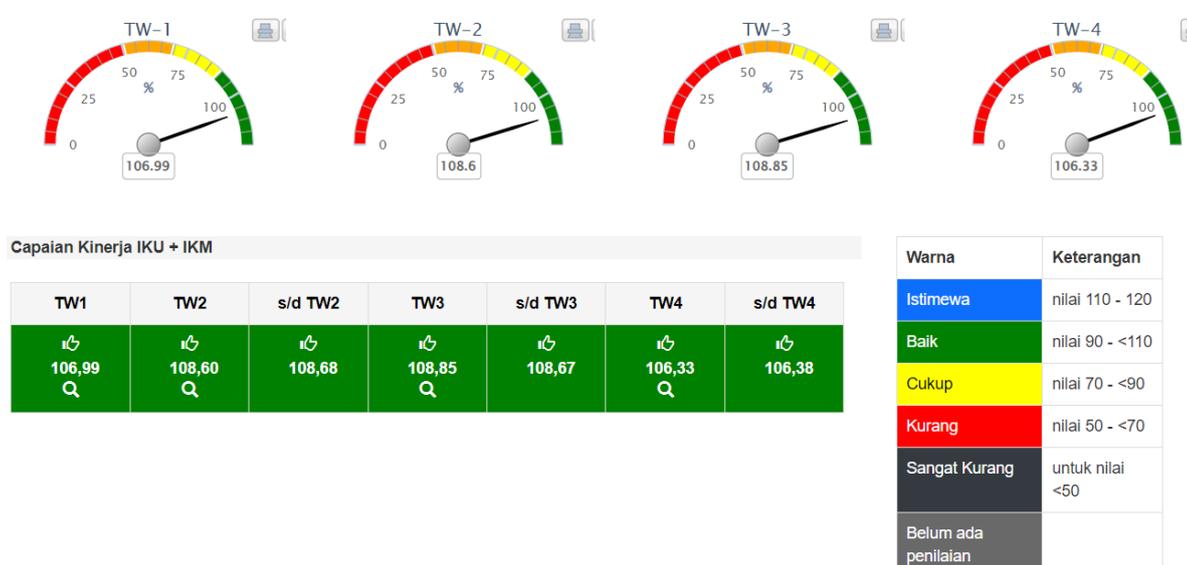
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Tahun 2023

1. Nilai Capaian IK+ISK Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Pangkalan PSDKP Lampulo telah menyempurnakan dan menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Nilai Capaian Kinerja IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Hasil capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 106,38 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik). Capaian kinerja Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Lampulo, tetap dalam tren positif dengan nilainya masih dalam indikator hijau.

2. Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023 ditabulasikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN	PERSENTASE	
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA, DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN						
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80	100	120%
SK1.2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6	100	114,16%
		ISK1.2.2	Indeks kinerja operasi speed boat pengawas (indeks)	87,6	94,88	108,31%
		ISK1.2.3	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)	100	100	100%
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK1.3.1	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100%
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN						
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	ISK2.1.1	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100	100	100%
SK2.1.	Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan	ISK2.2.1	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (%)	100	100	100%
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN						
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	ISK3.1.1	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100	100	100%
SK3.2	Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan	ISK3.2.1	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan (%)	100	100	100%
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	ISK4.1.1	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	100	120%
		ISK4.1.2	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80	66,67	83,34%
		ISK4.1.3	Indeks penyelesaian tindak lanjut penerapan sanksi administratif (indeks)	80	100	120%
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	ISK4.2.1	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	93	100	107,53%
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP P DITJEN. PSDKP						
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80	78,82	98,53%
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80	93,89	117,36%
		ISK5.1.3	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	75	88,83	118,44%
		ISK5.1.4	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100	100	100%
		ISK5.1.5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	78	84,39	108,19%
		ISK5.1.6	Penilaian mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	80,05	79,50	99,31%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN	PERSENTASE	
		ISK5.1.7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	100	120%
		ISK5.1.8	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21	22,34	106,38%
		ISK5.1.9	Inovasi yang dihasilkan	1	1	100%
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	92	121,67	120%
		ISK5.1.11	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	77,5	100	120%
		ISK5.1.12	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	77,5	98,75	120%
		ISK5.1.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	93,75	93,52	99,75%
		ISK5.1.14	Nilai Kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	82	84,96	103,61%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama Tahun 2023, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan, diuraikan sebagai berikut:

SK 1.1: Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

Indeks Kualitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk

ISK 1.1.1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”

Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan (80%).

Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Indeks kualitas pembinaan

POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

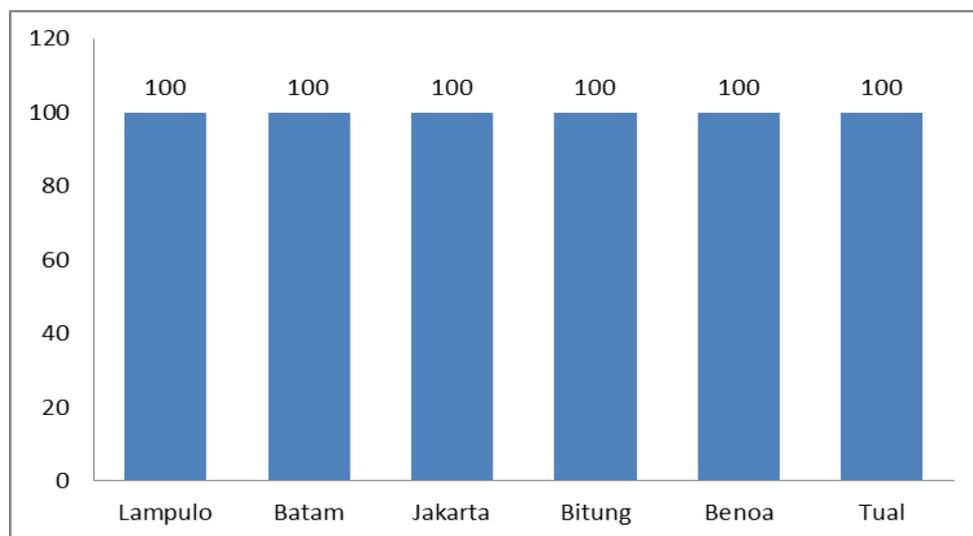
Capaian ISK 1.1.1. “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS” pada Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Hasil Capaian ISK 1.1.1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2023			
	T	TW	C	%
Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS	80	TW II	TW II	TW II
		50	100	120%
		TW IV	TW IV	TW IV
		80	100	120%

ISK 1.1.1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”, merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan tahun sebelumnya, juga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN. Pada tahun 2022, terdapat indikator kinerja terkait kegiatan pembinaan Pokmaswas dengan nomenklatur “Persentase Pokmaswas yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP”. Namun, dikarenakan adanya perbedaan satuan pengukuran, maka capaian kinerja tidak dapat dibandingkan.

Capaian ISK 1.1.1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target untuk ISK 1.1.1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS” dengan nilai indeks sebesar 50, telah tercapai nilai indeks sebesar 100, maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 120%. Sampai dengan bulan Desember tahun 2023, pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS dalam rangka mendampingi Komisi IV DPR RI telah selesai dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi, yaitu di Kota Padang Panjang – Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Aceh Tenggara – Provinsi Aceh, dan Kota Langsa, Provinsi Aceh.

Kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal bertempat di Desa Koto Katik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Hasil kegiatan Pembinaan POKMASWAS di Kota Padang Panjang, antara lain sebagai berikut:

- a.) Pembinaan POKMASWAS di Kota Padang Panjang dilakukan terhadap 5 (lima) POKMASWAS, yaitu:
 1. POKMASWAS Kami Saiyo
 2. POKMASWAS Sisik Parigi
 3. POKMASWAS Lembah Hijau
 4. POKMASWAS Lubuk Barokah
 5. POKMASWAS Perinto Bundo Nagari
- b.) Kegiatan Pembinaan POKMASWAS sangat diperlukan agar dapat memotivasi dan menguatkan kelembagaan POKMASWAS yang ada di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang dalam melaksanakan tugas sebagai kelompok sehingga pelanggaran / tindak pidana perikanan yang ada di wilayah masing-masing Kabupaten/Kota dapat terdeteksi sedini mungkin.
- c.) Pembinaan POKMASWAS juga bertujuan untuk mengoptimalkan peran POKMASWAS di wilayah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen untuk melakukan pembinaan POKMASWAS secara kontinyu, dengan menjalin komunikasi yang sinergis antara POKMASWAS, Pengawas Perikanan, serta dengan instansi-instansi terkait lainnya, sehingga sistem pengawasan SDKP berbasis masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2023 bertempat di Gedung Balai Musyafat Kutacane,

Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Hasil kegiatan Pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain sebagai berikut:

- a.) Pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan terhadap 2 (dua) POKMASWAS, yaitu:
 1. POKMASWAS Ayu Jaya
 2. POKMASWAS Bawan Jahe
- b.) Isu yang sedang marak di Provinsi Aceh, yaitu *Destuctive Fishing* atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, baham beracun, *stroom*, dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Isu yang sedang marak, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara adalah penangkapan ikan dengan cara *stroom* menggunakan genset.
- c.) Pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS diharapkan dapat mengoptimalkan peran POKMASWAS di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang tertib dan bertanggungjawab.

Kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kota Langsa Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 bertempat di Hotel Kartika, Jl. Ahmad Yani Nomor 214, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Hasil kegiatan Pembinaan POKMASWAS di Kota Langsa, antara lain sebagai berikut:

- d.) Pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan terhadap 2 (dua) POKMASWAS, yaitu Pokmaswas Bugak Jaya.
- e.) Isu yang sedang marak di Kota Langsa, yaitu *Destuctive Fishing* atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, baham beracun, *stroom*, dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Isu yang sedang marak, khususnya di Kabupaten Aceh Timur adalah penangkapan ikan dengan cara *stroom* menggunakan genset.
- f.) Pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS diharapkan dapat mengoptimalkan peran POKMASWAS di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Timur dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang tertib dan bertanggungjawab.

Capaian ISK 1.1.1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”, mengalami keberhasilan tercapainya target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada ISK 3.1.1, yaitu dengan menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan Pokmaswas, agar kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan baik. Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada ISK 3.1.1, yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap Pokmaswas secara rutin dan menyeluruh di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada ISK1.1.1, yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap Pokmaswas di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo secara rutin dan menyeluruh.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 1.1.1 sebesar Rp 300.000.000,00. Sampai dengan Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 299.599.999,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,85%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK1.2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan yang Efektif”, diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

ISK 1.2.1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%), terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan, antara lain: Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dan lain lain.

 - Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 (dua) unit kapal ikan per hari

- b. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG,2015)
 - Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis dan alokasi kapal setiap WPPNRI.
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%)
 - *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan Kegiatan SAR : Bobot 40%

Dukungan Kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot / mencapai target
- d. Hasil Dukungan Kegiatan Operasi yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Ilegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (Bobot 5%)
 - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 30%
 - Pemutusan Rumpon Ilegal : Bobot 30%
 - Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%

Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot / target tercapai

Capaian ISK 1.2.1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” pada Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Hasil Capaian ISK 1.2.1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2023			
	T	TW	C	%
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	87,6	TW I	TW I	TW I
		87,6	100	114,16%
		TW II	TW II	TW II
		87,6	100	114,16%
		TW III	TW III	TW III
		87,6	98,65	112,61%
		TW IV	TW IV	TW IV
87,6	100	114,16%		

Pada Tahun 2023, target ISK “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”

ditentukan nilai 87,6 telah tercapai nilai 100, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 114,16%. Rincian komponen capaian tersebut, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Rincian Komponen Capaian ISK 1.2.1: “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas”

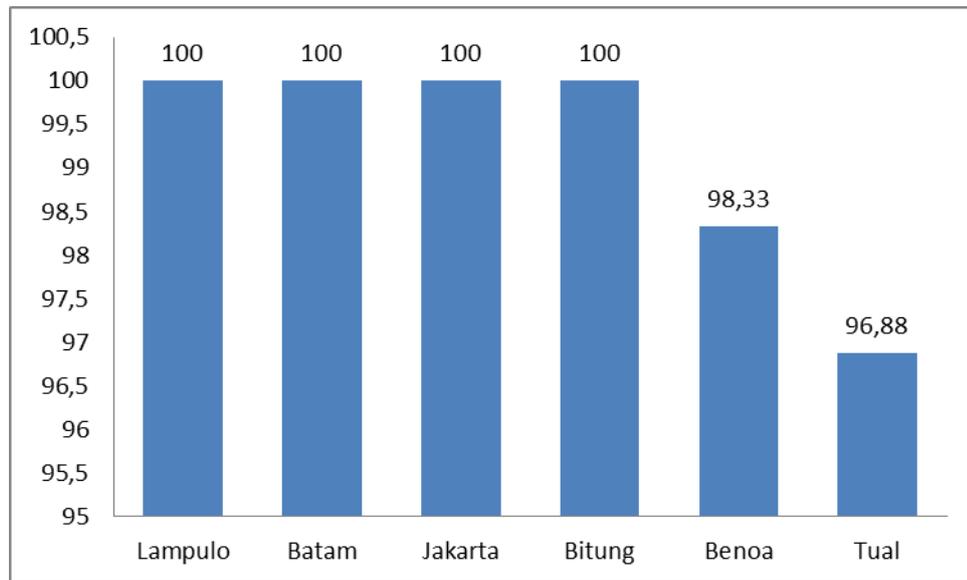
Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target / Realisasi	Nilai	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks
KP. Hiu 12	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)	Target	188	70	40	100,00
			Realisasi	188			
		Pemeriksaan Kelautan (30%)	Target	0	30		
			Realisasi	0			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	1,08	40	40	
			Realisasi	1,34			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)	Target	0	30	5	
			Realisasi	0			
Pemutusan Rumpon Illegal (30%)		Target	0	30			
		Realisasi	0				
Dukungan Operasi Bersama (40%)		Target	0	40			
		Realisasi	0				

Capaian ISK1.2.1 “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas”, merupakan indikator baru yang digunakan mulai tahun 2022, nomenklatur indikator tersebut berbeda dengan indikator pada RPJMN sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya.

Capaian ISK1.2.1 “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas” pada tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas		
Perbandingan	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	85	87,6
Capaian	88,31	100
% Realisasi	103,89%	114,16%

Capaian ISK1.2.1 “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas” pada tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada tabel berikut:



Capaian ISK 1.2.1. “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas” pada tahun 2023 mengalami keberhasilan tercapainya target. Dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, Capaian ISK 1.2.1. mengalami peningkatan nilai target dan realisasi.

Faktor keberhasilan tercapainya target dari variabel pembentuk tersebut adalah pemeriksaan kapal perikanan yang melebihi target yang telah ditentukan. Selain itu, cakupan wilayah pengawasan yang mencapai target juga menjadi faktor pendukung keberhasilan tercapainya komponen pembentuk ISK 1.2.1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”. Ketercapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh armada pengawasan KP Hiu-12 dikondisikan siap untuk beroperasi. Hal ini sejalan dengan kegiatan perawatan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo. Jumlah dan kondisi kesiapan Awak Kapal Pengawas juga menjadi penentu keberhasilan capaian. Awak Kapal Pengawas yang ditempatkan sudah memiliki kecakapan pengawakan kapal yang mumpuni. Pada tahun 2023, Awak Kapal Pengawas Pangkalan PSDKP Lampulo juga melakukan Medical Check-Up untuk pemantapan kondisi kesehatan selama bertugas.

Kendala yang dialami dalam mencapai target pada ISK1.2.1 pada tahun 2023, yaitu cuaca yang buruk di area WPPNRI 571 dengan kondisi angin kencang dan gelombang tinggi pada bulan-bulan tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk dijangkau oleh KP. Hiu-12. Selain itu, pada area WPPNRI 572 masih marak terjadi *IUU Fishing* oleh Kapal Lokal dan Kapal Ikan Asing (KIA).

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada ISK1.2.1, yaitu dengan tetap memperhatikan kesiapan armada kapal pengawas serta awak kapal

pengawas, sehingga kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan optimal.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 1.2.1 sebesar Rp 9.311.779.000,00. Sampai dengan Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 9.309.455.865,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,98%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 1.2.2: “Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional speedboat pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni;

- b. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%), terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
 - Setiap *Speed Boat* Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 (satu) unit kapal ikan per hari
- c. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing *speed boat* pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis *speed boat* pengawas
- d. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%);
 - *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan Kegiatan SAR : Bobot 40%

Dukungan Kegiatan SAR bersifat situasional, bagi *Speed Boat* Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot / mencapai target

e. Hasil Dukungan Kegiatan Operasi yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Ilegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

- Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
- Pemutusan Rumpon Ilegal : Bobot 40%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 20%

Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot / target tercapai

Capaian ISK 1.2.2: “Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas” pada Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Hasil Capaian ISK 1.2.2: “Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2023			
	T	TW	C	%
Indeks Kinerja Operasional <i>Speed Boat</i> Pengawas	87,6	TW I	TW I	TW I
		87,6	100	114,16%
		TW II	TW II	TW II
		87,6	98,83	112,82%
		TW III	TW III	TW III
		87,6	83,50	95,32%
TW IV	TW IV	TW IV		
87,6	94,88	108,31%		

Pada Tahun 2023, target ISK 1.2.2: “Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas” ditentukan nilai 87,6 telah tercapai nilai 94,88, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 108,31%. Rincian komponen capaian tersebut, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Rincian Komponen Capaian ISK 1.2.2: “Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas”

Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target / Realisasi	Nilai	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks
Dolphin ST. BL 01	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	25	50	40	96,09
			Realisasi	45			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	0	50		
			Realisasi	0			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,00010	36,09	36,09	
			Realisasi	0,00009			
Tindak Lanjut	Intercept Indikasi	Target	0	60	15		

Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target / Realisasi	Nilai	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks
	Target Operasi (15%)	Pelanggaran (60%)	Realisasi	0	40	5	
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0			
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
		Pemutusan Rumpon Illegal (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
Dukungan Operasi Bersama (20%)	Target	0	20				
	Realisasi	0					
Kakap	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	45	50	40	91,31
			Realisasi	102			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	0	50		
			Realisasi	0			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,00016	31,31	31,31	
			Realisasi	0,00013			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40	5	
			Realisasi	0			
		Pemutusan Rumpon Illegal (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
Dukungan Operasi Bersama (20%)		Target	0	20			
		Realisasi	0				
Napoleon-036	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	25	50	40	95,68
			Realisasi	57			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	0	50		
			Realisasi	0			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,00010	35,68	35,68	
			Realisasi	0,000009			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40	50	
			Realisasi	0			
		Pemutusan Rumpon Illegal (40%)	Target	0	40		
Realisasi			0				
Dukungan Operasi Bersama (20%)		Target	0	20			
		Realisasi	0				
Napoleon-045	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	46	50	40	97,33
			Realisasi	123			
		Pemeriksaan Kelautan	Target	0	50		

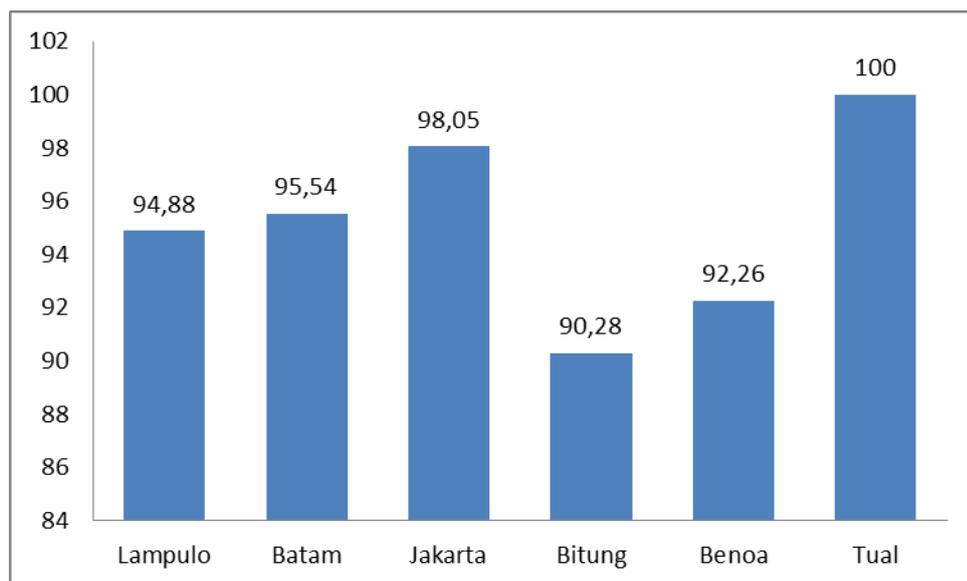
Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target / Realisasi	Nilai	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Realisasi	0	37,33	37,33	
			Target	0,00012			
			Realisasi	0,000011			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
		Pemutusan Rumpon Illegal (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Bersama (20%)	Target	0	20			
Realisasi		0					
RIB / Sea Rider	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	8	50	40	
			Realisasi	8			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	0	50		
	Realisasi		0				
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,00007	31,76	31,76	
			Realisasi	0,00006			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
Pemutusan Rumpon Illegal (40%)		Target	0	40			
		Realisasi	0				
Dukungan Operasi Bersama (20%)	Target	0	20				
	Realisasi	0					
Speed Boat PRL 8 m	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	19	47,37	40	
			Realisasi	18			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	0	50		
	Realisasi		0				
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,00022	38,18	38,18	
			Realisasi	0,00021			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
Pemutusan Rumpon Illegal (40%)		Target	0	40			
		Realisasi	0				
Dukungan Operasi Bersama (20%)	Target	0	20				
	Realisasi	0					
Nilai Indeks Kinerja Speed Boat Pengawas							94,88

Capaian ISK1.2.2 “Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas”, merupakan indikator baru yang digunakan mulai tahun 2022, nomenklatur indikator tersebut berbeda dengan indikator pada RPJMN sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya.

Capaian ISK1.2.2 “Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas” pada tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas		
Perbandingan	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	85	87,6
Capaian	99,58	100
% Realisasi	117,15%	114,16%

Capaian ISK1.2.1 “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas” pada tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Capaian ISK 1.2.2. “Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas” pada tahun 2023 mengalami keberhasilan tercapainya target. Dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, Capaian ISK 1.2.2. mengalami peningkatan nilai target dan realisasi.

Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada ISK1.2.2, yaitu kondisi speed boat pengawas yang dikondisikan untuk siap beroperasi. Hal ini sejalan dengan kegiatan perawatan speed boat pengawas yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kendala yang dialami dalam pencapaian target pada ISK1.2.2 pada tahun 2023, yaitu area pengawasan pada WPPNRI 572 yang sangat luas dengan kondisi cuaca yang buruk pada bulan-bulan tertentu, sehingga tidak memungkinkan untuk dijangkau oleh *speed boat* pengawas. Selain itu, pada area WPPNRI 571 masih marak terjadi IUU Fishing oleh Kapal Lokal dan Kapal Ikan Asing (KIA).

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada ISK1.2.2., yaitu dengan tetap memperhatikan kesiapan armada *speed boat* pengawas, sehingga kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan optimal.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 1.2.2 sebesar Rp 973.144.000,00. Sampai dengan Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 964.667.427,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,13%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 1.2.3: “Persentasi Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas”

Persentasi pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel

Logistik kapal terdiri dari:

- a. Bahan Bakar Minyak (BBM) , dan
- b. Pelumas

Logistik Personel terdiri dari :

- a. Bahan Makanan
- b. Air Tawar, dan
- c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin)

Dalam hal terjadi kerusakan kapal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan operasi pengawasan maka, target dianggap tercapai (100%). Daftar Faktor Penghitung Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%);
2. Pelumas (20%);
3. Bahan Makanan (30%);
4. Air Tawar (15%);

5. Alat-alat Pelayanan (5%)

Kriteria penilaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP, sebagai berikut:

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%);

Pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan Operasi Pengawasan SDKP (triwulan). Perhitungan: $(4/4) \times 30\%$.

2. Pelumas (20%);

Pemenuhan kebutuhan Pelumas untuk kebutuhan permesin Kapal Pengawas dalam menunjang pengawasan SDKP (semester). Perhitungan: $(2/2) \times 20\%$.

3. Bahan Makanan (30%);

Pemenuhan kebutuhan bahan makanan bagi awak kapal Pengawas (bulanan). Perhitungan: $(12/12) \times 30\%$

4. Air Tawar (15%);

Pemenuhan kebutuhan air tawar untuk keperluan sehari - hari AKP di atas kapal (bulanan). Perhitungan : $(12/12) \times 15\%$.

5. Alat – Alat Pelayanan (5%)

Pemenuhan kebutuhan alat – alat pelayanan guna menunjang kegiatan operasional kapal (semester). Perhitungan: $(2/2) \times 5\%$.

Hasil pengukuran ISK. 1.2.3: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Hasil Capaian ISK “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”

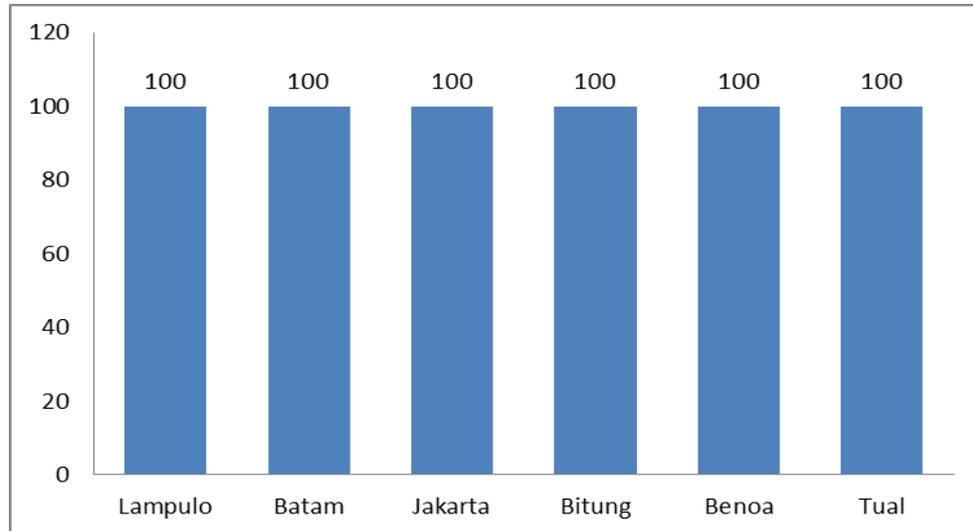
INDIKATOR KINERJA UTAMA	2023			TARGET 2024
	T	C	%	
Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	100%	100%	100%	100%

Pada Tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target ISK1.2.3 “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” sebesar 100, telah tercapai nilai indeks sebesar 100, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%.

ISK1.2.3 “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”, merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan tahun sebelumnya, juga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN. Pada tahun 2022, terdapat indikator kinerja terkait pemenuhan logistik dengan nomenklatur “Indeks

Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”. Namun, dikarenakan adanya perbedaan satuan pengukuran, maka capaian kinerja tidak dapat dibandingkan.

Capaian ISK1.2.3: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Capaian ISK1.2.3: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target pada IKU ini adalah dengan melakukan tertib administrasi terhadap kegiatan pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP. Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada ISK1.2.3 adalah dengan tetap mempertahankan tertib administrasi terkait pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 1.2.3 sebesar Rp. 9.311.779.000,00 Sampai dengan tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 9.309.455,865,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,98%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK1.3: Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

ISK 1.3.1: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP”

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan. Sarana Pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, meliputi: 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 6 (lima) unit (*Speedboat dan Rigid Inflatable Boat*). Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari : perawatan pencegahan (*preventive maintenance 50%*), perawatan prediktif (*predictive maintenance 40%*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance 10%*).

Capaian ISK1.3.1. “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” pada Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Hasil Capaian ISK 1.3.1: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2023			TARGET 2024
	T	C	%	
Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	100%	100%	100%	100%

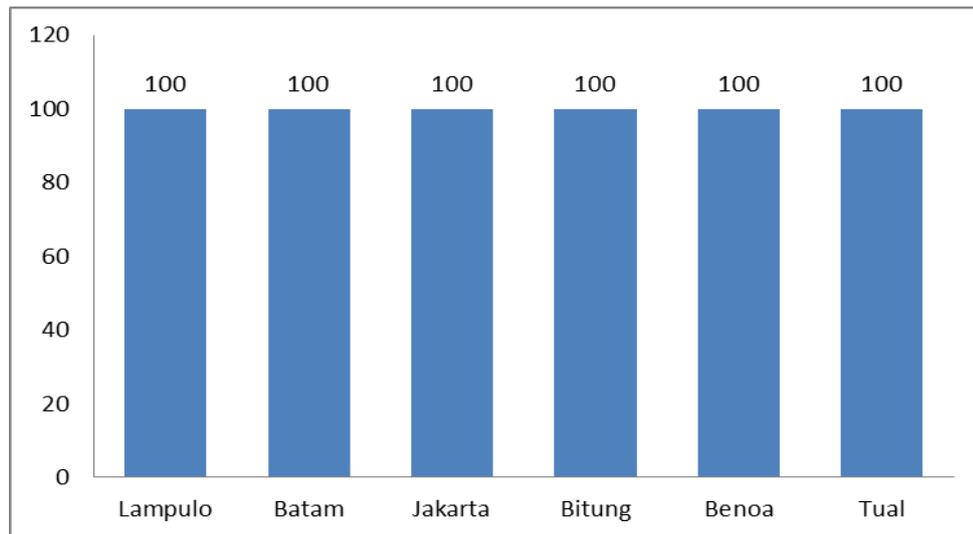
Capaian ISK1.3.1. “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” tahun 2023, dibandingna dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2023	REALISASI 2023
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian ISK1.3.1. “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP				
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	-	100%	100%	100%
Capaian	-	100%	100%	100%
% Realisasi	-	100%	100%	100%

Capaian ISK1.3.1. “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Pada Tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK1.3.1: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan” sebesar 100%. Sampai dengan tahun 2023, telah tercapai 100%, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%.

Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, berjumlah 6 (enam) unit, yang terdiri dari: 1 (satu) unit Kapal Pengawas, 4 (empat) unit *Speed Boat* Pengawas, dan 1 (satu) unit *Rigid Inflatable Boat* Pengawas. Adapun bukti pendukung perawatan sarana dan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2023 dibuktikan dengan adanya Laporan Perawatan Preventif, Laporan Perawatan Prediktif, dan Laporan Perawatan Darurat, serta dibuktikan dengan Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas dan *Speed Boat* Pengawas pada bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Kapal Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo adalah Kapal Pengawas Hiu-12 yang berukuran 32 m. Bentuk fisik Kapal Pengawas Hiu-12 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.1. Kapal Pengawas Hiu-12

Jumlah *speed boat* pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sebanyak 6 (enam) unit, yaitu Kapal Pengawas Napoleon-045, Baramundi 01,

dan Sea Rider yang dioperasikan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo, Kapal Pengawas Napoleon-036 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Sibolga, Kapal Pengawas Kakap yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Padang, dan Kapal Pengawas Dolphin ST. BL. 01 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Bengkulu. Adapun bentuk fisik dari *speed boat* pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel bergambar berikut:

Tabel 3.10. Speed Boat Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Nama Speed Boat Pengawas	Gambar	Lokasi
1.	Napoleon-045		Pangkalan PSDKP Lampulo
2.	Napoleon-036		Satwas SDKP SDKP Sibolga
3.	Kakap		Satwas SDKP Padang

No.	Nama <i>Speed Boat</i> Pengawas	Gambar	Lokasi
4.	Dolphin ST. BL. 01		Satwas SDKP Bengkulu
5.	Sea Rider		Pangkalan PSDKP Lampulo
6.	Baramundi 01		Pangkalan PSDKP Lampulo

Faktor yang mendukung tercapaian ISK1.3.1 pada tahun 2023, yaitu pelaksanaan kegiatan perawatan preventif, perawatan prediktif, dan perawatan darurat sesuai dengan kebutuhan armada pengawasan. Faktor yang menjadi penghambat dalam mencapai target IKU ini adalah tidak tersedianya barang atau suku cadang untuk perawatan armada pengawasan di Indonesia, sehingga harus melakukan pemesanan terlebih dahulu dari pihak distributor dan memerlukan waktu cukup lama untuk menunggu yang berdampak dalam waktu perawatan armada yang lebih lama.

Program yang menunjang tercapainya target ISK 1.3.1 pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo membuat jadwal perencanaan kegiatan perawatan sarana dan prasarana pengawasan dengan menyesuaikan kondisi mesin (*engine hour*), sehingga mesin yang digunakan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan patroli. Perawatan sarana dan prasarana lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2023, dilakukan terhadap 1 (satu) unit Kapal Pengawas dan 6 (enam) unit Speed Boat Pengawas. Dalam hal pemilihan

penyedia jasa untuk kegiatan perawatan dilaksanakan berdasarkan kompetensi, sehingga pelaksanaan kegiatan perawatan armada pengawasan SDKP dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 1.3.1 sebesar Rp 1.824.732,00. Sampai dengan Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp. 1.824.481.052,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,99%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK2.1: Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

ISK 2.1.1: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan

Pemeriksaan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR), pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha jasa kelautan (antara lain: ekstrasi garam, wisata tirta, alse), pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi) dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, pelaku usaha yang memiliki kapal di bawah 10 GT yang tidak terindikasi melakukan DF (tidak membawa bom, bus, setrum, serta ikan hasil DF).

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan.

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11. Rincian Penentuan Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan/atau Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Capaian ISK 2.1.1: “Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan, disajikan pada tabel berikut:

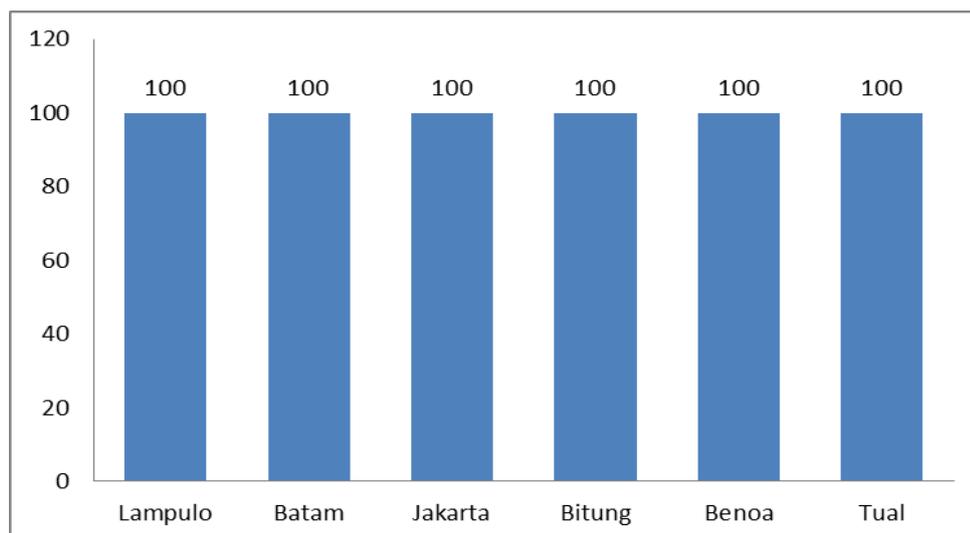
Tabel 3.12. Hasil Capaian ISK 2.1.1: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	100	100	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target nilai kualitas penyelesaian pemeriksian pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan pada Tahun 2023 sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%, maka persentase realisasi capaian pada ISK 2.1.1 sebesar 100%.

ISK 2.1.1: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”, merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan tahun sebelumnya, juga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN. Pada tahun 2022, terdapat indikator kinerja terkait penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan dengan nomenklatur “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”. Namun, dikarenakan adanya perbedaan satuan pengukuran dan cara perhitungan, maka capaian kinerja tidak dapat dibandingkan.

Capaian ISK 2.1.1: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan” dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

NO	Bulan	OBJEK PENGAWASAN					
		Kawasan Konservasi Perairan	Ruang Laut	Jenis Ikan Dilindungi	Jasa Kelautan	Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<i>Destructive Fishing</i>
1	Januari						
2	Februari		3 Pelaku Usaha			4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha
3	Maret	2 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha		1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	22 Pelaku Usaha
4	April	1 Pelaku Usaha					5 Pelaku Usaha
5	Mei	1 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha
6	Juni		8 Pelaku Usaha		1 Pelaku Usaha		15 Pelaku Usaha
7	Juli		1 Pelaku Usaha				8 Pelaku Usaha
8	Agustus	1 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha			1 Pelaku Usaha	
9	September	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha
10	Oktober		5 Pelaku Usaha		1 Pelaku Usaha		16 Pelaku Usaha
11	November	2 Pelaku Usaha			1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha
12	Desember	1 Pelaku Usaha		1 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	
TOTAL		10 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	11 Pelaku Usaha	103 Pelaku Usaha

Capaian ISK 2.1.1: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target ISK 2.1.1: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan” pada tahun 2023, dikarenakan adanya penambahan 1 (satu) Polsus PWP3K sehingga memaksimalkan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan. Selain itu, terjalinnya koordinasi yang sinergis antar instansi terkait juga mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Terpenuhinya rincian komponen pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan juga merupakan usaha

dari Pangkalan PSDKP Lampulo dalam melaksanakan tertib administrasi pelaporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan.

Kendala yang dialami Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mencapai target ISK 2.1.1 pada tahun 2023, yaitu wilayah pengawasan yang begitu luas dan sulit dijangkau, terutama terkait pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan anggaran yang terbatas.

Kegiatan yang dapat menunjang untuk dapat memaksimalkan pencapaian kinerja pada ISK 2.1.1, yaitu dengan meningkatkan kompetensi pegawai dengan ikut serta dalam diklat Polsus PWP3K, serta menyesuaikan lokasi kegiatan pengawasan pada sektor kelautan dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 2.1.1 sebesar Rp 616.894.000. Sampai dengan Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 615.555.392,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,78%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK2.2: Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

ISK 2.2.1: “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan”

Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan

Data dan informasi intelijen kelautan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi

Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

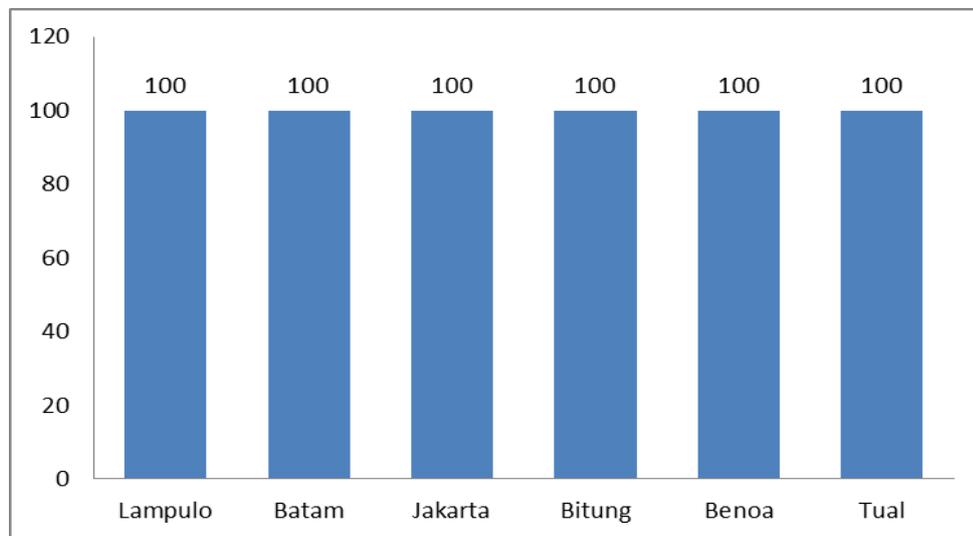
Capaian ISK 2.2.1: “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan”, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14. Hasil Capaian ISK 2.2.1: “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan	100%	100%	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan pada tahun 2023 sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%, maka persentase realisasi capaian pada ISK 2.1.1 sebesar 100%. Hasil dari pencpaaian target pada ISK 2.2.1 diperoleh dari adanya laporan aduan dari masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

ISK 2.2.1: “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan”, merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan tahun sebelumnya, juga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN. Capaian ISK 2.2.1: “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan” dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Capaian ISK 2.2.1: “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung pencapaian target pada ISK 2.2.1, yaitu dengan melakukan pengecekan secara berkala terkait aduan masyarakat, sehingga aduan tersebut bisa cepat ditindaklanjuti sampai selesai. Selain itu, pemenuhan target juga dilakukan melalui kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terhadap kegiatan pengawasan pelaku usaha sumber daya kelautan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 2.1.1 sebesar Rp 616.894.000. Sampai dengan Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 615.555.392,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,78%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK3.1.: Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

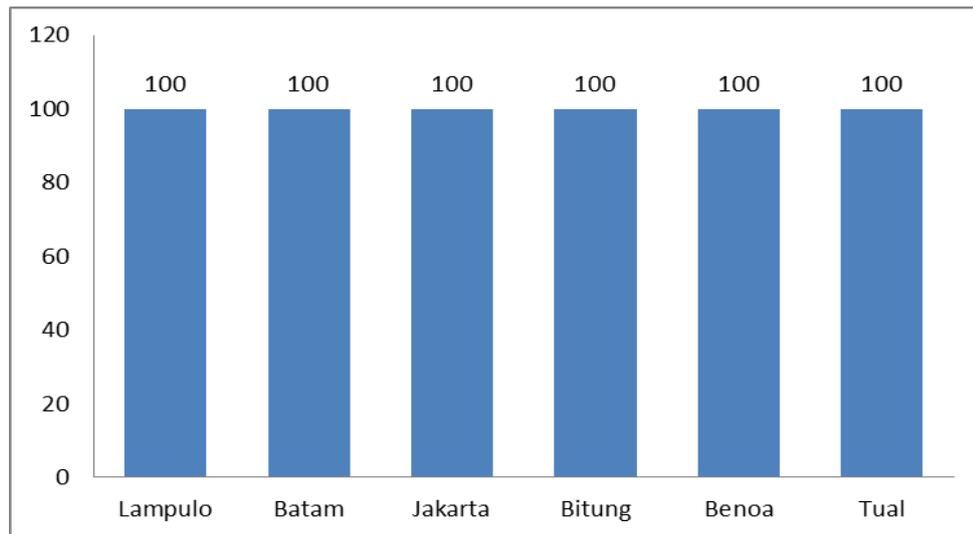
ISK 3.1.1: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	100	100	100%

Pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK 3.1.1: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” dengan nilai sebesar 100, telah tercapai nilai 100, maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%.

ISK 3.1.1: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan”, merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan tahun sebelumnya, juga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN. Pada tahun 2022, terdapat indikator kinerja terkait penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dengan nomenklatur “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”. Namun, dikarenakan adanya perbedaan satuan pengukuran dan cara perhitungan, maka capaian kinerja tidak dapat dibandingkan.

Capaian ISK 3.1.1: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan, disajikan pada tabel berikut:

No	Objek Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha Diawasi
1.	OSS	8
2.	Penangkapan Ikan Terukur	89
3.	Budidaya Lobster, Kepiting, dan Rajungan	9
4.	Insidental	
	Budidaya	30
	Kapal Angkut Ikan Hidup	1
	UPI	13
	Distribusi	3
Total		153

Capaian ISK 3.1.1: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target ISK 3.1.1: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” pada tahun 2023, yaitu dengan melakukan perencanaan kegiatan pengawasan agar target yang ada dapat termonitor dengan baik.

Kendala yang dialami Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mencapai target ISK 3.1.1 pada tahun 2023, yaitu masih kurangnya kompetensi Pengawas Perikanan dalam menentukan nilai kepatuhan teknis pelaku usaha, sehingga berpengaruh dalam menentukan rekomendasi hasil pengawasan pelaku usaha perikanan.

Kegiatan yang dapat menunjang untuk dapat memaksimalkan pencapaian kinerja pada ISK3.1.1, yaitu dengan meningkatkan kompetensi pegawai dengan ikut serta dalam pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengawasan pelaku usaha perikanan agar kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan maksimal.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 3.1.1 sebesar Rp 578.540.000,00. Sampai dengan Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 575.500.755,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,47%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK3.2: Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

ISK 3.2.1: “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan”

Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan

Data dan informasi intelijen perikanan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas Perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi

Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

Capaian ISK 3.2.1: “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan”, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Hasil Capaian ISK 3.2.1: “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan”

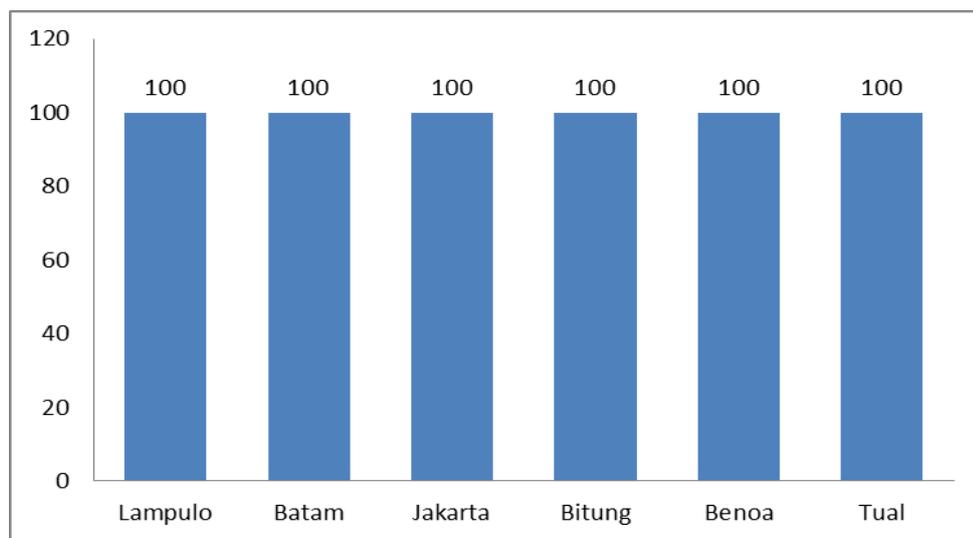
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan	100%	100%	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan pada tahun 2023 sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%, maka persentase realisasi capaian pada ISK 2.1.1 sebesar 100%. Hasil dari

pencapaian target pada ISK 3.2.1 diperoleh dari adanya laporan aduan dari masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

ISK 3.2.1: “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan”, merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan tahun sebelumnya, juga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

Capaian ISK32.2.1: “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan” dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Capaian ISK 3.2.1: “Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung pencapaian target pada ISK 2.2.1, yaitu dengan melakukan pengecekan secara berkala terkait aduan masyarakat, sehingga aduan tersebut bisa cepat ditindaklanjuti sampai selesai. Selain itu, pemenuhan target juga dilakukan melalui kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terhadap kegiatan pengawasan pelaku usaha sumber daya perikanan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 3.1.1 sebesar Rp 578.540.000,00. Sampai dengan Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 575.500.755,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,47%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK4.1. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas”, diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

ISK 4.1.1: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
- c) Dit. PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.
- d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Capaian ISK 4.1.1: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”, disajikan pada tabel berikut:

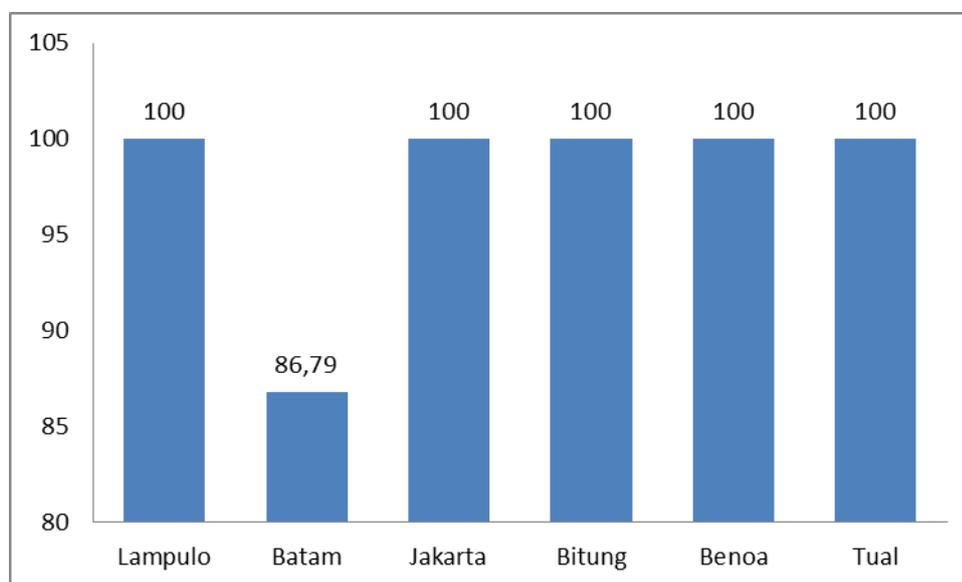
Tabel 3.16. Hasil Capaian ISK 4.4.1: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	80	100	120%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target indeks pengenaan sanksi administratif pada tahun 2023 sebesar 80, telah tercapai sebesar 100, maka persentase realisasi capaian pada ISK 4.1.1 sebesar 120%.

ISK 4.1.1: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”, merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan tahun sebelumnya, juga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

Capaian ISK 4.1.1: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Adapun rincian hasil pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Pemantauan atas Pelaksanaan Sanksi Administratif Sumber Daya Kelautan

No	Nama Perusahaan	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi	Tanggal Pengenaan Sanksi	Tanggal Berakhir Sanksi	Kewajiban Pemenuhan Sanksi	Rekomendasi
1.	CV. MATA IE RESORT	91039	Tidak Memiliki PKKPR	SP1	28 Februari 2023	2 Maret 2023	Sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp 2.802.000,00	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan rehabilitasi ekosistem terumbu karang seluas 0,15 Ha
2.	CV. EKY'S MOMONG RESORT	91039	Tidak Memiliki PKKPR	SP 1	25 September 2023	-	Sudah	Pengurusan perizinan PKKPR
3.	GRAHA D'FIT LM	91039	Tidak Memiliki PKKPR	SP 1	25 September 2023	-	Sudah	Pengurusan perizinan PKKPR
4.	FERNIS GIAWA	91039	Tidak Memiliki PKKPR	SP 1	22 November 2023	-	Sudah	Pengurusan perizinan PKKPR

Tabel 3.18. Pemantauan atas Pelaksanaan Sanksi Administratif Sumber Daya Perikanan

No	Nama Perusahaan	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi	Tanggal Pengenaan Sanksi	Tanggal Berakhir Sanksi	Kewajiban Pemenuhan Sanksi	Rekomendasi
1.	KM. FADHIL 01	03111	Tidak Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku (SIPI)	SP 1	7 Juni 2023	-	Sudah	Segera melakukan pengurusan perizinan berusaha dan selalu membawa dokumen yang masih berlaku saat melakukan penangkapan ikan
2.	KM. RIKI 04	03111	Tidak Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku (SIPI)	SP 1	7 Juni 2023	-	Sudah	Segera melakukan pengurusan perizinan berusaha dan selalu membawa dokumen yang masih berlaku saat melakukan penangkapan ikan
3.	KM. TELUK DALAM – 02	03111	Tidak Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku (SIPI & SPB)	SP 1	Pemilik: 4 September 2023 Nahkoda: 5 September 2023	-	Sudah	Segera melakukan pengurusan perizinan berusaha dan selalu membawa dokumen yang masih berlaku saat melakukan penangkapan ikan
4.	CV. SAMUDERA MARINE FISH	46206	Importasi Komoditas Perikanan dan Pergaraman yang Tidak Sesuai dengan Tempat, Jenis, Waktu, dan Standar Mutu	Denda Administratif	29 Agustus 2023	31 Agustus 2023	Sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp 11.312.500,00	
5.	KM. VINCENT JAYA – 02	03111	Transshipment	Denda Administratif	21 Agustus 2023	6 September 2023	Sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp 31.600.000,00	-
6.	RDN 05	03111	Tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	1 September 2023	1 September 2023	SUDAH	Diberikan SP1
7.	Chalil	03111	Tidak memenuhi perizinan	Penyerahan Ke DKP Sumatera	25 Oktober 2023	25 Oktober 2023	SUDAH	Diberikan SP1

No	Nama Perusahaan	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi	Tanggal Pengenaan Sanksi	Tanggal Berakhir Sanksi	Kewajiban Pemenuhan Sanksi	Rekomendasi
			berusaha	Barat				
8.	Sorga	03111	Tidak memenuhi perizinan berusaha	Penyerahan Ke DKP Sumatera Barat	25 Oktober 2023	25 Oktober 2023	SUDAH	Diberikan SP1
9.	Camar-2		Tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda administratif	7 November 2023	7 November 2023	Sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 332.030.400	-
10.	Pajri 02	03111	Tidak memenuhi perizinan berusaha	Penyerahan ke DKP Sumatera Barat	29 November 2023	29 November 2023	SUDAH	Diberikan SP1
11.	Riva 03	03111	Tidak memenuhi perizinan berusaha	Penyerahan ke DKP Sumatera Barat	29 November 2023	29 November 2023	SUDAH	Diberikan SP1
12.	Diah 03	03111	Tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda administratif	Proses penetapan	11 Desember 2023	Sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 9.081.600	Segera melakukan pengurusan perizinan berusaha dan selalu membawa dokumen yang masih berlaku saat melakukan penangkapan ikan
13.	Marwah		Tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda administrative	Proses penetapan	19 Desember 2023	Sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 68.640.000	Segera melakukan pengurusan perizinan berusaha dan selalu membawa dokumen yang masih berlaku saat melakukan penangkapan ikan
14.	Deevan	03111	Tidak memenuhi perizinan berusaha	Penyerahan Ke DKP Sumatera Barat	11 Desember 2023	11 Desember 2023	SUDAH	Diberikan SP 1
15.	Tiara	03111	Tidak memenuhi perizinan berusaha	Penyerahan ke DKP Sumatera Barat	11 Desember 2023	11 Desember 2023	SUDAH	Diberikan SP 1

Hasil tindak lanjut pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan Tahun 2023, yang terdiri dari 4 (empat) pelaku usaha di bidang sumber daya kelautan dan 15 (lima belas) pelaku usaha di bidang sumber daya perikanan.

Capaian ISK 4.1.1: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung pencapaian target pada ISK 4.1.1, yaitu dengan aktif melakukan koordinasi dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran dalam penyelesaian pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan.

Faktor yang menghambat dalam pencapaian target pada ISK 4.1.1, adalah kurang kooperatifnya pelaku usaha dalam penyelesaian pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 4.1.1 sebesar Rp 150.000.000,00. Sampai dengan Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 149.973.694,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,98%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 4.1.2: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Capaian ISK 4.1.2: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, disajikan pada tabel berikut:

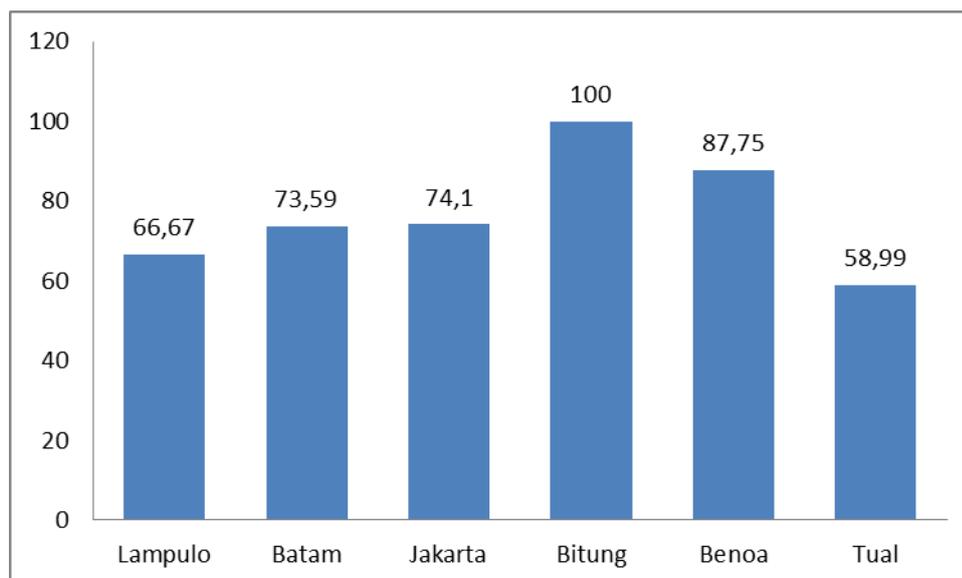
Tabel 3.19. Hasil Capaian ISK 4.1.2: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	80	66,67	83,34%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target indeks pemeriksaan hasil analissi pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2023 sebesar 80, telah tercapai sebesar 66,67, maka persentase realisasi capaian pada ISK 4.1.2 sebesar 83,34%

ISK 4.1.2: “Indeks Pemeriksaaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan tahun sebelumnya, juga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

Capaian ISK 4.1.2: “Indeks Pemeriksaaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Adapun rincian pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.20. Pemantauan atas Pelaksanaan Sanksi Administratif Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

No	Pemilik	Nama Kapal	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Tanggal Sanksi	Jenis Sanksi	Kewajiban Pemenuhan	Rekomendasi
1	DEZA KASYFI	MEUTUAH KEMBAR	03111	DPI	24 S.D 25 JANUARI 2023	SP 1	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
2	JAMALUDDIN	TETAP JAYA 01	03111	DPI	05 APRIL 2023	SP 1	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
3	ASNAWI	KAKAP BARU 01	03111	DPI	27 MARET DAN 7 APRIL 2023	BUKAN PELANGGARAN	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
4	M. IQBAL	RINDA MULIYA	03111	DPI	26 JULI 2023	SP 1	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
5	PT. SINAR DESA BERSAUDARA	SINAR BARU XIV	03111	DPI	24-27 MARET 2023 DAN 8 JULI 2023	1. SP 1 2. SP 2 (22 AGUSTUS 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
6	ARMIANA	SINAR JAYA 77	03111	DPI	29 SEPTEMBER 2023	2022 : SP 1 2023 : SP 2 (15 DESEMBER 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
7	MAWARDI	KAKAP MERAH BARU	03111	DPI	26 FEBRUARI 2023 DAN 4 NOVEMBER 2023	1. SP 1 2. PROSES SP 2 (REKOM 14 DESEMBER 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
8	RAZAMI	PUSAKA ESA 01	03111	DPI	2-3 APRIL 2023 DAN 1 AGUSTUS 202	1. SP 1 (10 JULI 2023) 2. SP 2 (11 SEPTEMBER 2023) 3. PROSES DENDA ADMINISTRASI	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut

No	Pemilik	Nama Kapal	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Tanggal Sanksi	Jenis Sanksi	Kewajiban Pemenuhan	Rekomendasi
						4.		
9	ARMIANA	SAUDARA BAHAGIA	03111	DPI	28 JANUARI DAN 26 MARET 2023	2022 : SP 1 2023 : 1&2. SP 2 (23 MEI 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
10	SUMARTO	DRAKE ANSON	03111	DPI	31 DESEMBER 2022-2 JANUARI 2023	SP 1	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
11	TJA LIE	DAUN HIJAU	03111	DPI	14 JANUARI 2023	SP 1	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
12	ARIFIN	LIMA SAUDARA	03111	DPI	9 JANUARI 2023	SP 1	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
13	LIM BUN HE	SUMBER KASIH - I	03111	DPI	17 JANUARI 2023	SP 1	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
14	YAULI	MAKMUR	03111	DPI	19 FEBRUARI 2023, 10 MARET 2023	SP 1	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
15	WILSON MUKTAR	SEMANGAT MITRA BAHARI	03111	DPI	20-24 JANUARI 2023 DAN 30 JANUARI 2023	2022 : SP 1 2023 : SP 2 (17 APRIL 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
16	KHA BAN	SUN SUN LI LI	03111	DPI	11 JANUARI 2023	SP 1	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
17	MARIANI	TETAP JAYA	03111	DPI	20-24 MEI 2023	BUKAN PELANGGARAN (DATA BMKG)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
18	ANUGERAH SAMUDERA HINDIA	TERATAI - I	03111	DPI	17 FEBRUARI-6 MARET 2023, 12-17 MARET 2023, 19 MARET 2023	BUKAN PELANGGARAN (DATA BMKG)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
19	TUTI MEGAWATI WIJAYA	CITRA ABADI	03111	DPI	10 MARET 2023	SP 1 (10 JULI 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
20	PT. HORIZON BAHARI NUSANTARA	SERASI	03111	DPI	20 MARET 2023	SP 1 (10 JULI 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
21	CENDRA TAUFIK	SIDO MULYO SANTOSO	03111	DPI	17 MARET 2023	SP 1 (10 JULI 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
22	CHANDRA	CAHAYA MAS 88	03111	DPI	1 - 5 MARET 2023	SP 1 (10 JULI 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
23	EDDY THIANDA	REZEKI LAUT	03111	DPI	11 MEI 2023	SP 1 (10 JULI 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
24	SUMITRO	BINTANG SINAR REJEKI	03111	DPI	07 APRIL 2023	SP 1 (10 JULI 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut

No	Pemilik	Nama Kapal	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Tanggal Sanksi	Jenis Sanksi	Kewajiban Pemenuhan	Rekomendasi
25	BUDIYANTO	BINTANG WIJAYA	03111	DPI	25-30 MEI 2023	BUKAN PELANGGARAN (SUKET TANGKAHAN)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
26	BOY STEVEN	ALAM JAYA	03111	DPI	5 MEI 2023	SP 1 (7 AGUSTUS 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
27	SASCO MARITIM INDONESIA, PT/FRENDY HUNG	AS ROMA	03111	DPI	14 MARET 2023	SP 1 (7 AGUSTUS 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
28	YUSDI EDY	KARYA YAKIN	03111	DPI	25-30 MEI 2023	SP 1 (7 AGUSTUS 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
29	HASAN	LUCKY STEP	03111	DPI	8 AGUSTUS 2023	SP 1 (31 AGUSTUS 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
30	SEYANTO	SAPTA PESONA	03111	DPI	12 AGUSTUS 2023	SP 1 (14 SEPTEMBER 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
31	GHO OEI ENG	REZEKI INTI KARYA	03111	DPI	20 SEPTEMBER 2023 DAN 9 OKTOBER 2023	SP 1 (25 OKTOBER 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
32	SUWANTO	TRI JAYA	03111	DPI	15 JANUARI DAN 14 JULI 2023	1&2. SP 1 (18 AGUSTUS 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
33	EDDY THIANDA	REZEKI HASIL KARYA	03111	DPI	6 OKTOBER, 20 OKTOBER, DAN 7 NOVEMBER 2023	1,2,3. SP 1 (6 DESEMBER 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
34	SYARIFUDDIN LUBIS, SE	PUTERA RIAU	03111	DPI	22 OKTOBER 2023	1. SP 1 (6 DESEMBER 2023) (TIDAK ADA BUKTI DUKUNG)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
35	GHO OEI ENG	BINTANG REZEKI	03111	DPI	9 NOVEMBER 2023	1&2. SP 1 (6 DESEMBER 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
36	BIN SOEN	BINTANG TERANG	03111	DPI	16 FEBRUARI 2023	1. SP 1 (TIDAK ADA DATA BMKG) 29 Maret 2023 2. SP 2 (15 DESEMBER 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
37	FAREL RUMAHORBO	BINTANG REZEKI KEMBAR	03111	DPI	14 MARET, 21 SEPTEMBER, DAN 6 OKTOBER 2023	1. SP 1 (10 JULI 2023) 2&3. SP 2 (15 DESEMBER 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
38	HOK TJAI ALIAS BARLI	SINAR HARAPAN	03111	DPI	10 MARET, 17 SEPTEMBER, DAN 22 OKTOBER 2023	1. SP 1 (11 MEI 2023) 2&3. SP 2 (15 DESEMBER 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
39	SEYANTO	SERASI PUTRA	03111	DPI	17 SEPTEMBER, 4 OKTOBER, 15 OKTOBER 2023	1&2. SP 1 (19 OKTOBER 2023) 3. PROSES SP 2 (6 DESEMBER 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut

No	Pemilik	Nama Kapal	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Tanggal Sanksi	Jenis Sanksi	Kewajiban Pemenuhan	Rekomendasi
40	BONG KA	INDRA MAJU	03111	DPI	14 JANUARI DAN 1 NOVEMBER 2023	1. SP 1 (10 JULI 2023) 2. PROSES SP 2 (6 DESEMBER 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
41	PT. NELAYAN KAWAN KITA	KARYA HARAPAN	03111	DPI	5 Mei, 6 OKTOBER, 4 NOVEMBER 2023	1. SP 1 (10 JULI 2023) 2&3. PROSES SP 2 (6 DESEMBER 2023) (TIDAK ADA BUKTI DUKUNG)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
42	SUKALI	SUMBER REZEKI - I	03111	DPI	10 APRIL, 6 OKTOBER, 10 NOVEMBER 2023	1. SP 1 (11 MEI 2023) 2&3. PROSES SP 2 (6 NOVEMBER 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
43	ADIDAS KURNIAWAN	KARYA LESTARI	03111	DPI	9 APRIL, 17 OKTOBER, 6 NOVEMBER 2023	1. SP 1 (11 MEI 2023) 2&3. PROSES SP 2 (6 DESEMBER 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
44	HERMAN	CAHAYA MUJUR - I	03111	DPI	19 APRIL DAN 9 NOVEMBER 2023	1. SP 1 (18 MEI 2023) 2. PROSES SP 2 (REKOM 14 DESEMBER 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
45	DJAJA	ONASSIS	03111	DPI	11 MARET, 8 APRIL, 18 SEPTEMBER, 2 NOVEMBER 2023	1. SP 1 (30 Maret 2023) 2. SP 2 3,4,5. PROSES DENDA ADMINISTRASI	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
46	PT. ANUGERAH SAMUDERA HINDIA	SINAR LAUT	03111	DPI	27-30 JANUARI 2023	SP 1	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
47	OEI SIU HONG	KARYA YOUNGSUN	03111	DPI	9 NOVEMBER 2023	SP 1	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
48	JUNEIDI	TERATAI - III	03111	DPI	10 JUNI, 23 OKTOBER, 18 NOVEMBER, 5 DESEMBER 2023	1. SP 1 (7 AGUSTUS 2023) 2&3. PROSES SP 2 (REKOM 14 DESEMBER 2023)	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
49	SUSANTO FRANS	HASIL NELAYAN	03111	DPI	12 NOVEMBER DAN 9 DESEMBER 2023	SP 1	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
50	PT. HARAPAN SARI LAUT	REZEKI SARI	03111	DPI	4 OKTOBER, 4 NOVEMBER DAN 18 NOVEMBER 2023	1&2. SP 1 (6 DESEMBER 2023) 2. Proses SP2	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
51	HUSIN	KARYA AGUNG SUKSES	03111	DPI	10 OKTOBER, 5 NOVEMBER DAN 5 DESEMBER 2023	1&2. SP 1 (6 DESEMBER 2023) 3. Proses SP2	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
52	HOSMAN	USAHA MAJU	03111	DPI	4 NOVEMBER DAN 4 DESEMBER 2023	1. SP 1 (6 DESEMBER 2023) 2. Proses SP2	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut
53	H. RIZWAN EFFENDI	KELUARGA BAHARI-LLB	03111	DPI	5 NOVEMBER 2023	1. SP 1 (6 DESEMBER 2023) 2. Proses SP2	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap

No	Pemilik	Nama Kapal	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Tanggal Sanksi	Jenis Sanksi	Kewajiban Pemenuhan	Rekomendasi
								kapal tersebut
54	H. RIZWAN EFFENDI	SUMBER MUTIARA	03111	JALUR PENANGKAPAN	3 OKTOBER-15 OKTOBER 2023	1. SP 1 (15 NOVEMBER 2023) 2. PROSES SP 2 (6 DESEMBER) 2023	SUDAH	Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut

Pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan terhadap 54 pelaku usaha, dengan rincian 50 pelaku usaha telah diperiksa, dan 4 pelaku usaha belum dilakukan pemeriksaan. Adapun keempat pelaku usaha yang belum diperiksa, adalah KM. Saudara Bahagia, KM. Rezeki Sari, KM. Karya Agung Sukses, dan KM. Usaha Maju yang saat ini masih dalam proses pemanggilan.

Capaian ISK 4.1.2: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” mengalami kegagalan pencapaian. Hal tersebut dikarenakan Terdapat perbedaan data pemeriksaan hasil analisis pemantauan SDKP antara pusat (Dit. PP) dan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Perbedaan ini dikarenakan perbedaan *closing periode* pemasukan data pada google sheet perkembangan hasil analisis pemantauan yang diisi secara kolektif, dimana Dit PP telah menghentikan (*close*) data pada 31 Desember 2023, sementara UPT memasukan dan memperhitungkan data yang masuk setelah *closing periode* dengan pertimbangan data tersebut masih merupakan data hasil pemantauan tahun 2023 (berdasarkan tanggal surat hasil pemantauan yang disampaikan Dit. POA) walaupun masuk dalam pengisian *google sheet* setelah 31 Desember 2023 Pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku usaha SPKP Pangkalan PSDP Lampulo, telah selesai ditangani sebanyak 36 kasus dari total 54 kasus yang ditangani, sehingga perolehan capaian hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 66,67 dari target 80. Persentase realisasi capaian diperoleh 83,34%.

Faktor yang menghambat dalam pencapaian target pada ISK 4.1.2, yaitu pelaku usaha yang kurang koordinatif dalam memenuhi pemanggilan terkait pengambilan Berita Acara Pemeriksaan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 4.1.2 sebesar Rp 100.000.000,00. Sampai dengan Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 100.000.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK4.1.3: “Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif”

Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif yaitu merupakan tingkat pencapaian kinerja MONEV pengenaan sanksi administratif oleh UPT PSDKP. Komponen penilaian terhadap indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif, disajikan pada tabel berikut:

NO	TAHAP PENYELESAIAN	NILAI TAHAPAN	DATA DUKUNG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persiapan	20	Laporan Pengenaan Pelanggaran Sanksi Administratif	
2	Analisis pemilihan lokasi MONEV	20	Dokumen Rencana Pelaksanaan MONEV	ST/Memo/Rencana Kegiatan Disposisi/ Dokumen Lainnya
3	Pelaksanaan koordinasi, Supervisi/MONEV	55	Dokumentasi pelaksanaan	
4	Penyusunan laporan Supervisi/MONEV	5	Laporan pelaksanaan MONEV	
JUMLAH		100		

Capaian ISK 4.1.3: “Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif”, disajikan pada tabel berikut:

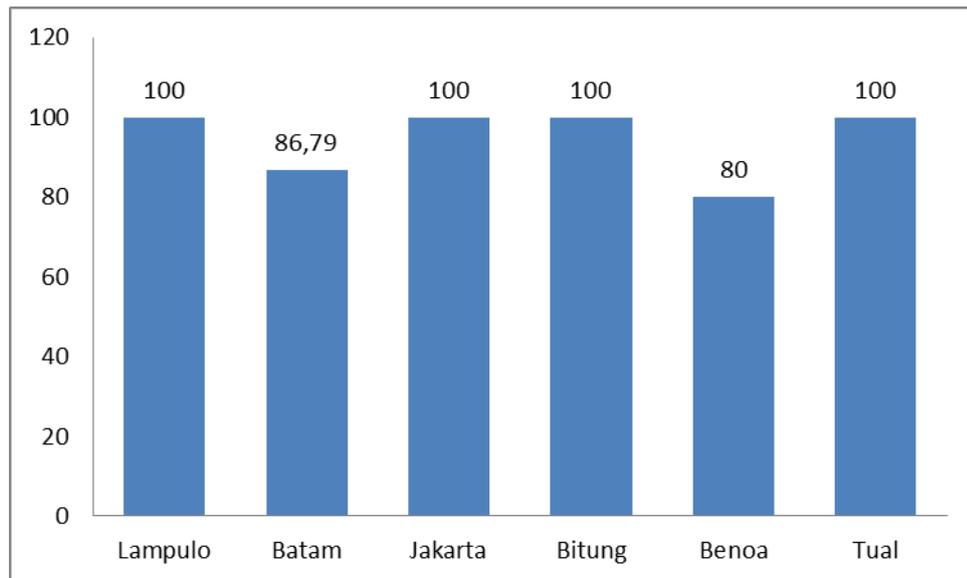
Tabel 3.21. Hasil Capaian ISK 4.1.3: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	80	100	120%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target indeks pemeriksaab penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif pada tahun 2023 sebesar 80, telah tercapai sebesar 100, maka persentase realisasi capaian pada ISK 4.1.3 sebesar 120%.

ISK 4.1.3: “Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif”, merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan tahun sebelumnya, juga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

Capaian ISK 4.1.3: “Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif” dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Pencapaian target pada ISK 4.1.3: “Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif” dilakukan dengan melakukan kegiatan rapat internal terkait monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif, dengan memenuhi tahap persiapan, analisis pemilihan lokasi monev, pelaksanaan koordinasi/supervisi monev, penyusunan laporan supervisi/monev.

Capaian ISK 4.1.3: “Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung pencapaian target pada ISK 4.1.3, yaitu dengan rutin melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 4.1.3 sebesar Rp 100.000.000,00. Sampai dengan Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 100.000.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK4.2. Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

ISK 4.2.1: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Hasil capaian ISK 4.2.1: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.22. Hasil Capaian ISK 4.2.1: “Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	93	100	107,53%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target ISK 4.2.1: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” ditentukan dengan nilai indeks sebesar 93. Sampai dengan tahun 2023, perkembangan penyelesaian kasus TPKP di Pangkalan PSDKP Lampulo memperoleh nilai indeks sebesar 100, sehingga persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 107,53%. Adapun rincian capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

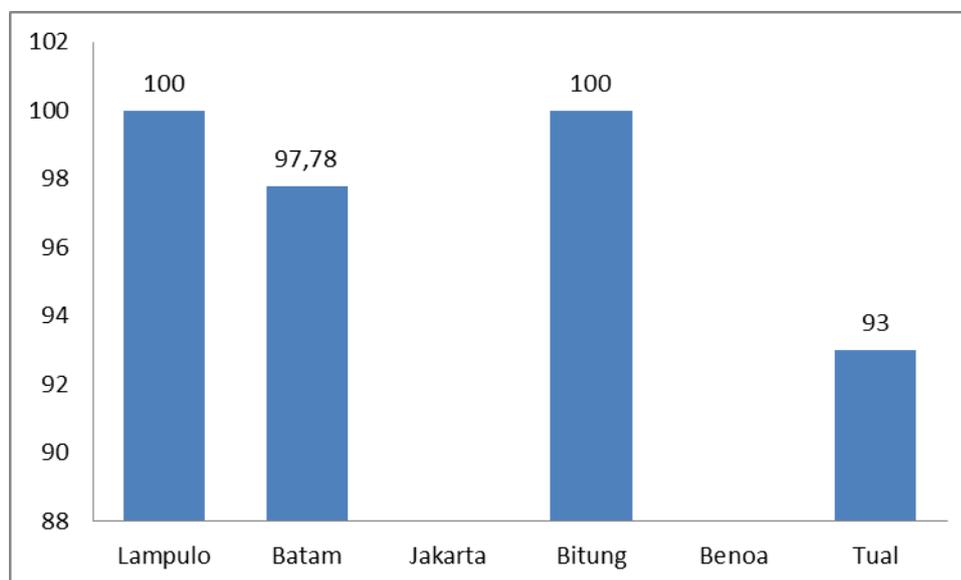
Tabel 3.23. Rincian Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

NAMA KAPAL	KEBANGSAAN KAPAL	ALAT TANGKAP	TANGGAL KEJADIAN	TAHAPAN PROSES HUKUM	TANGGAL MULAI PENYIDIKAN	SANGKAAN PASAL
KM. Surya Citra 25	Indonesia	Trawl	24 Mei 2023	Putusan	26 Mei 2023	Pasal 85 jo Pasal 9 Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terkait penggunaan alat tangkap terlarang berupa Trawl dan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, terkait Kewajiban Memiliki Perijinan Berusaha
KM. Laot Jaya	Indonesia	Trawl	24 Mei 2023	Putusan	26 Mei 2023	Pasal 85 jo Pasal 9 Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terkait penggunaan alat tangkap terlarang berupa Trawl dan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, terkait Kewajiban Memiliki Perijinan Berusaha

NAMA KAPAL	KEBANGSAAN KAPAL	ALAT TANGKAP	TANGGAL KEJADIAN	TAHAPAN PROSES HUKUM	TANGGAL MULAI PENYIDIKAN	SANGKAAN PASAL
KM. Rezeki Nauli GT. 16	Indonesia	Peledak/Bo m	08 Juni 2023	Putusan	13 Juni 2023	Pasal 84 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana
KM. Rezeki Nauli GT. 16	Indonesia	Peledak/Bo m	08 Juni 2023	Putusan	13 Juni 2023	Pasal 84 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana

ISK 4.2.1: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”, merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan tahun sebelumnya, juga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

Capaian ISK 4.2.1: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik sebagai berikut:



Capaian ISK 4.2.1: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”, pada tahun 2023 mengalami keberhasilan tercapainya target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada ISK 4.2.1 adalah dengan menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan melakukan koordinasi antar instansi terkait pengembangan penyidikan.

Kendala yang dialami oleh Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mencapai target ISK 4.2.1 di tahun 2022, adalah waktu penyidikan yang lama. Selain itu, proses tahap II yang diminta oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU harus disesuaikan dengan *locus delicti* sehingga membutuhkan anggaran yang lebih besar dalam penyelesaian penanganan pelanggaran.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada ISK 4.2.1, yaitu dengan meningkatkan soliditas penyidik untuk keberhasilan penyidikan, serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi terkait. Bentuk kegiatan dalam peningkatan soliditas aparat penegak hukum, antara lain dengan melaksanakan kegiatan forum tindak pidana kelautan dan perikanan dan *Coffee Morning* dengan instansi terkait penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 4.2.1 sebesar Rp 341.600.000,00. Sampai dengan Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 341.591.768. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK5.1: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP”, diidentifikasi ke dalam 14 (empat belas) Indikator Kinerja Manajerial (IKM), yaitu:

ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan, yang dilakukan melalui survei pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan di satker UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

Hasil capaian ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.24. Hasil Capaian ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2023			
	T	TW	C	%
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	TW I	TW I	TW I
		80	90,64	113,3%
		TW II	TW II	TW II
		80	85,90	107,36%
		TW III	TW III	TW III
		80	89,12	111,40%
		TW IV	TW IV	TW IV
		80	78,82	98,53%
Rata-rata Nilai IKM SLO Tahun 2023 = 86,12		% Target 2022 = 107,65%		

Pada triwulan IV tahun 2023, target ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan dengan nilai indeks sebesar 80. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pengguna layanan penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada triwulan IV tahun 2023, diperoleh capaian nilai indeks sebesar 78,82. Persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 98,53%.

Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada triwulan IV tahun 2023 diberikan kepada 32 orang responden yang tersebar di Pangkalan PSDKP Lampulo, Satwas SDKP Aceh Barat, Satwas SDKP Simeulue, Satwas SDKP Sibolga, Satwas SDKP Padang, dan Satwas SDKP Bengkulu. Kegiatan pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober s/d 31 Desember 2023.

Capaian nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, selama tahun 2023 diperoleh nilai 86,12. Hasil capaian telah melebihi target tahunan.

Capaian ISK 5.1.1 “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.25. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

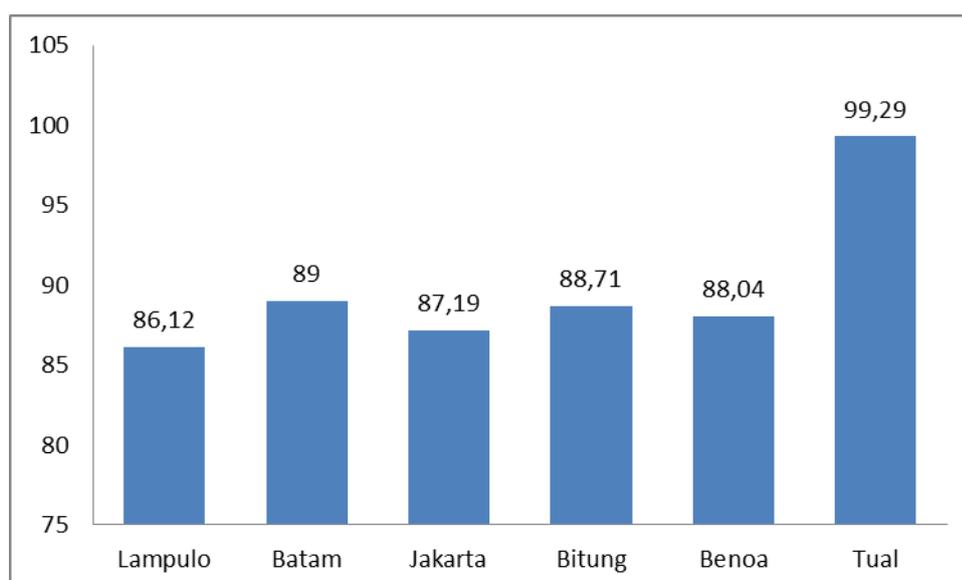
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2023	REALISASI 2023
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	80	80	82	84	86	80	86,12

Capaian IK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.26. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo				
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	80	80	80	80
Capaian	90,08	89,14	90,48	86,12
% Realisasi	112,60%	111,43%	113,084%	107,65

Capaian IK 5.1.1 “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Pencapaian target dikarenakan pelayanan yang diberikan di Pangkalan PSDKP Lampulo terkait Standar Laik Operasi telah mengalami perbaikan dan di evaluasi setiap triwulan, dan setiap koreksi yang diberikan masyarakat penerima layanan menjadi input perbaikan bagi pelaksanaan pelayanan publik terkait SLO di Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.1 sebesar Rp 11.675.933.000,00. Sampai dengan tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 11.643.058.531,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,72%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.2: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan), yang dilakukan melalui survei pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) yang dilaksanakan di satker UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

Tabel 3.27. Hasil Capaian ISK 5.1.2: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2023			
	T	TW	C	%
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	TW I	TW I	TW I
		80	93,89%	117,36%
		TW II	TW II	TW II
		80	93,89%	117,36%
		TW III	TW III	TW III
		80	93,89%	117,36%
		TW IV	TW IV	TW IV
		80	93,89%	117,36%
Rata-rata Nilai IKM SLO Tahun 2023 = 93,89		% Target 2023 = 117,36%		

Pada Tahun 2023, target ISK 5.1.2: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan dengan nilai indeks sebesar 80. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pengguna layanan penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan

Ikan) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2023, diperoleh capaian nilai indeks sebesar 93,89. Persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 117,36%.

Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Tahun 2023 diberikan kepada 5 orang responden yang tersebar di Pangkalan PSDKP Lampulo. Kegiatan pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023. Dikarenakan mulai dari triwulan II tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menerima permohonan pengurusan LVHPI, maka hasil survey mengacu pada capaian terakhir.

Capaian ISK 5.1.2 “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.28. Perbandingan Target RPJMN pada ISK 5.1.2: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

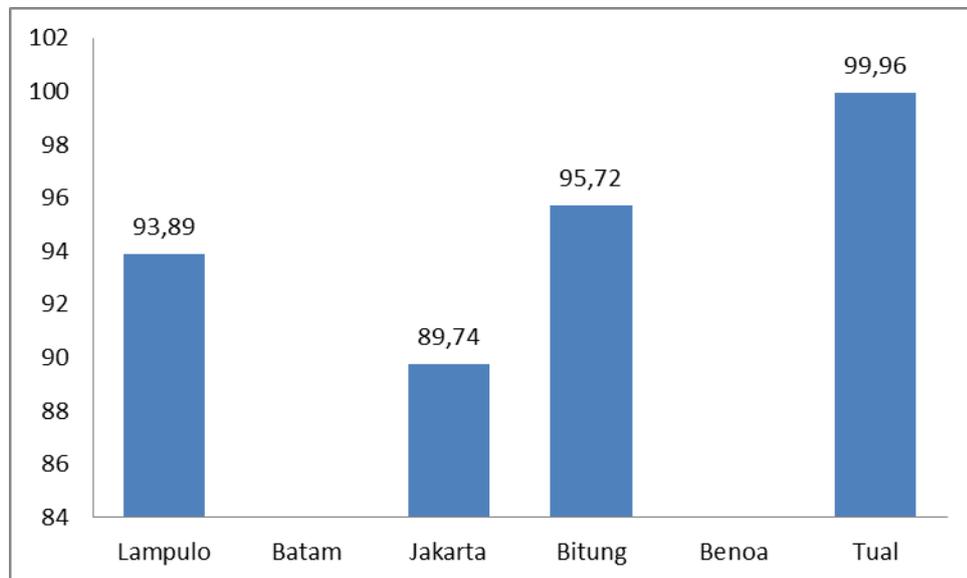
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2023	REALISASI 2023
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	80	80	82	84	86	80	93,89

Capaian ISK 5.1.2: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.29. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada ISK 5.1.2: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo				
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	80	80	80	80
Capaian	90,08	89,14	90,48	93,89
% Realisasi	112,60%	111,43%	113,084%	117,36%

Capaian ISK 5.1.2: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Pada tahun 2023, ISK 5.1.2 mengalami keberhasilan pencapaian target dikarenakan pelayanan yang diberikan di Pangkalan PSDKP Lampulo terkait Lembar Verifikasi Pendaratan Ikan (LVHPI) telah mengalami perbaikan dan di evaluasi setiap triwulan, dan setiap koreksi yang diberikan masyarakat penerima layanan menjadi input perbaikan bagi pelaksanaan pelayanan publik terkait LVHPI di Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.2 sebesar Rp 26.676.000,00. Sampai dengan tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 26.655.699,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,92%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.3: “Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo”

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-

KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kriteria pemenuhan capaian pada ISK5.1.3: “Nilai WBK Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo:, antara lain:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Capaian ISK 5.1.3. “Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.30. Hasil Capaian ISK 5.1.3: “Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo	75	88,83	118,44%

Capaian IK 5.1.3: “Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo”, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.31. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo”

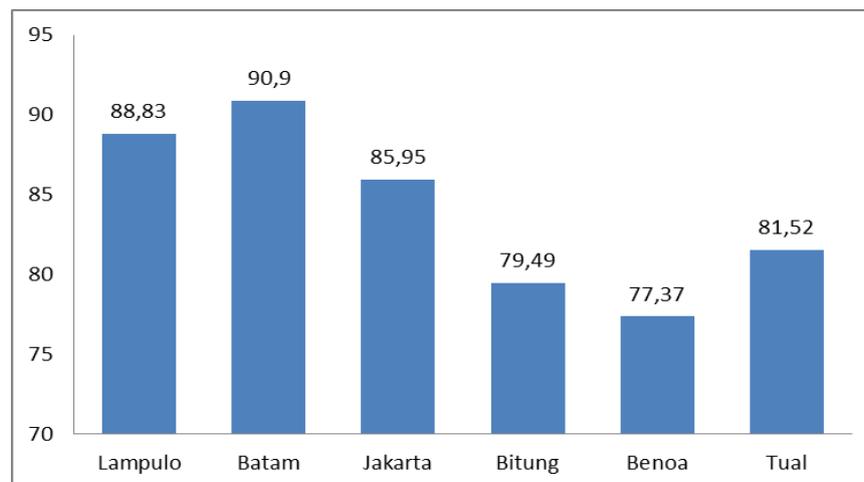
Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2023	REALISASI 2023
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	75	76	77	78	75	88,83

Capaian ISK 5.1.3: “Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.32. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada ISK 5.1.3: “Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo				
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	-	75	75	75
Capaian	-	80,88	84,91	88,83
% Realisasi	-	111,43%	107,84%	118,44%

Capaian ISK 5.1.3: “Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target ISK 5.1.3. “Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo” dengan nilai sebesar 75, telah tercapai nilai sebesar 88,83. Nilai tersebut diperoleh dari Penilaian Mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas yang telah disampaikan ke Sekretaris Ditjen. PSDKP melalui Surat Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri LKE Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 Nomor: B.121/PSDKPLan.1/TU.140/I/2024 oleh Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo.

Adapun rincian hasil penilaian mandiri pada lembar kerja evaluasi pembangunan zona integritas Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (PENILAIAN MANDIRI)

AREA PEMENUHAN		BOBOT	PEMENUHAN	REFORM	NILAI	%	PEMENUHAN NILAI MIN.	
A	PENGUNGKIT	60.00						
	1	MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	3.41	3.00	6.41	80.06%	OK
	2	PENATAAN LAKSANA	7.00	2.33	2.83	5.17	73.81%	OK
	3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	4.44	4.25	8.69	86.92%	OK
	4	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	5.00	4.51	9.51	95.05%	OK
	5	PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	6.44	6.88	13.32	88.77%	OK
	6	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	4.67	3.96	8.63	86.29%	OK
TOTAL PENGUNGKIT						51.71	86.19%	OK
B	HASIL	40.00						
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22.50			21.54	95.72%	OK
	a	Nilai survey persepsi korupsi (Survey eksternal: Indeks persepsi anti korupsi/IPAK)	17.50			16.54	94.50%	OK
	b	Capaian kinerja lebih baik dari pada capaian kinerja sebelumnya	5.00			5.00	100.00%	OK
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17.50			15.58	89.00%	OK
	a	Nilai persepsi kualitas pelayanan (Survey eksternal): Indeks persepsi kualitas pelayanan publik/IPKP	17.50			15.58	89.00%	OK
TOTAL HASIL						37.11	92.78%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI						88.83		OK

Capaian ISK 5.1.3. “Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo” mengalami keberhasilan pencapaian target. Hal tersebut dikarenakan seluruh pegawai di Pangkalan PSDKP Lampulo telah

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.3 sebesar Rp 11.675.933.000,00. Sampai dengan tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 11.643.058.531,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,72%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.4: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Capaian ISK 5.1.4. “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

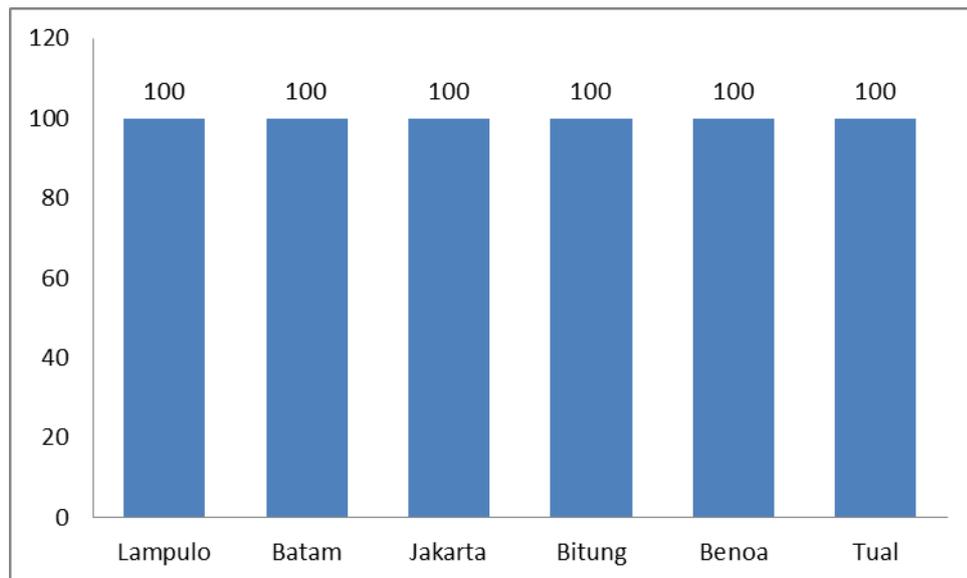
Tabel 3.33. Hasil Capaian ISK 5.1.4: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target ISK 5.1.4: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian

Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 100%, telah tercapai 100%, maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%.

ISK 5.1.4: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan tahun sebelumnya, juga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN. ISK 5.1.4: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Capaian ISK 5.1.4: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, pada tahun 2023 mengalami keberhasilan pencapaian target. Capaian dapat memenuhi target dikarenakan pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko yang dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko telah dilaksanakan dan dipenuhi dokumennya.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.4 sebesar Rp 11.675.933.000,00. Sampai dengan tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 11.643.058.531,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,72%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.5: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- Pendidikan:
 - S3 (Nilai 25)
 - S2 (Nilai 20)
 - S1 (Nilai 15)
 - D3 (Nilai 10)
 - DII/DI/SMA (Nilai 5)
 - SMP/SD (Nilai 1)

Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:

- Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:
 - DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:
 - DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:
 - DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)

Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)
- b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)

- c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)
- d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)
- e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)

Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:

- a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
- b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
- c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
- d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

Capaian ISK 5.1.5. “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.33. Hasil Capaian ISK 5.1.5: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2023			
	T	TW	C	%
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	78	TW II	TW II	TW II
		71	72	101,41%
		TW IV	TW IV	TW IV
		78	84,39	108,19%

Pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK 5.1.5 “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, dengan nilai 78, telah tercapai nilai 84,39 sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 108,19%.

Capaian ISK 5.1.5. “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2023, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.34. Perbandingan Target RPJMN pada ISK 5.1.5. “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

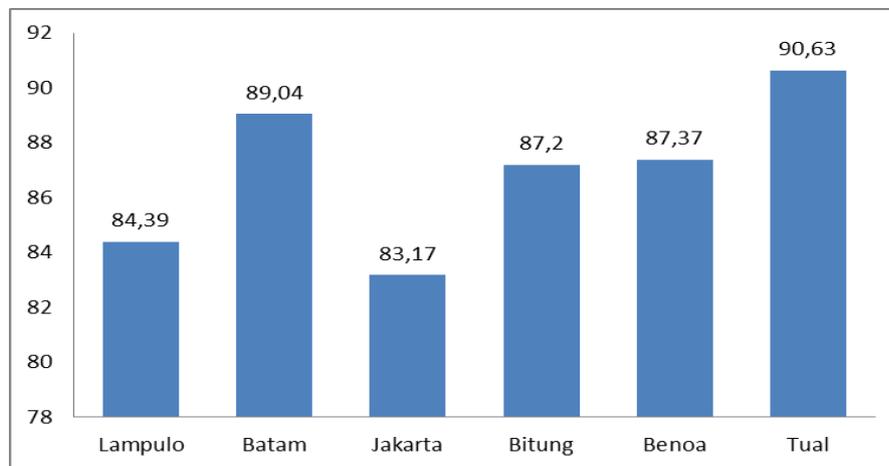
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2023	REALISASI 2023
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	73	74	75	76	78	84,39

Capaian ISK 5.1.5: “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.35. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada ISK 5.1.5: “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo				
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	72	73	77	78
Capaian	75,17	78,69	79,02	84,39
% Realisasi	104,4%	107,79%	109,62%	108,19%

Capaian ISK 5.1.5: “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Rincian pemenuhan nilai indeks profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel berikut:

	Nama	Kualifikasi			Kompetensi						Kinerja			Disiplin			TOTAL	Keterangan
		Tingkat Pendidikan	IP	Prosentase	Diklatpim	Diklat Fungsional	Diklat 20 JP	Seminar	IP	Prosentase	Predikat Kinerja	IP	Prosentase	Hukuman Disiplin	IP	Prosentase		
1	SAHONO BUDIANTO	S-2	23	92%	0	-	15	10	25	62.5 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	78	SEDANG
2	THOMAS ROMANO PUTRA	S-1	21	84%	15	-	15	10	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	91	SANGAT TINGGI
3	MUKLIS	S-2	23	92%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	93	SANGAT TINGGI
4	DWI ROSITA FITRIANINGRUM	S-1	22	88%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	92	SANGAT TINGGI
5	ANDRIYANTO	D-II/D-I/SMA	20	80%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	90	TINGGI
6	DESI HANDAYANI	S-1	22	88%	-	-	0	0	0	0%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	52	SANGAT RENDAH
7	MUHAMMAD FAISAL	S-1	22	88%	-	-	0	17.5	17.5	43.75 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	69.5	RENDAH
8	MARDIANA	D-III	21	84%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	91	SANGAT TINGGI
9	DWI NAZARUDIN AMRULLAH	S-1	22	88%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	92	SANGAT TINGGI
10	ZAINUDIN	S-1	22	88%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	92	SANGAT TINGGI
11	NOVRY SANGIAN	D-III	21	84%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	91	SANGAT TINGGI
12	VENDY REYGANT REI	S-1	22	88%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	92	SANGAT TINGGI
13	DARMIDAR	S-1	22	88%	-	-	0	17.5	17.5	43.75 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	69.5	RENDAH
14	DEDI NOFRIADI	S-1	22	88%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	92	SANGAT TINGGI
15	ANMA TETOVO DAUD	S-1	22	88%	-	-	0	17.5	17.5	43.75 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	69.5	RENDAH
16	HANUDIN	D-II/D-I/SMA	20	80%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	90	TINGGI
17	HERY POERNAMA	S-1	22	88%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	92	SANGAT TINGGI
18	BAGUS RIDHO YULIANTO	D-III	21	84%	-	-	11.25	17.5	28.75	71.88 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	79.75	SEDANG

	Nama	Kualifikasi			Kompetensi						Kinerja			Disiplin			TOTAL	Keterangan
		Tingkat Pendidikan	IP	Prosentase	Diklatpim	Diklat Fungsional	Diklat 20 JP	Seminar	IP	Prosentase	Predikat Kinerja	IP	Prosentase	Hukuman Disiplin	IP	Prosentase		
19	YEYEN NOFRIWAN PUTRA	D-II/D-I/SMA	20	80%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	90	TINGGI
20	RAHMAT FAJAR	D-III	21	84%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	91	SANGAT TINGGI
21	MUH. SYAKUR AGUNG	D-III	21	84%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	91	SANGAT TINGGI
22	AMDANI	D-II/D-I/SMA	20	80%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	90	TINGGI
23	MUHAMMAD SAMSUL MA ARIF	D-II/D-I/SMA	20	80%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	90	TINGGI
24	FIKRIYANSYAH	D-II/D-I/SMA	20	80%	-	-	0	17.5	17.5	43.75 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	67.5	RENDAH
25	AGUS SETIAWAN	D-II/D-I/SMA	20	80%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	90	TINGGI
26	HERNO ADIANTO	S-1	20	80%	-	15	15	10	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	90	TINGGI
27	DIAN PATRIA KELIAT	S-2	23	92%	-	15	0	10	25	62.5 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	78	SEDANG
28	MUHAMMAD ACHYAR	S-1	20	80%	-	15	0	10	25	62.5 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	75	SEDANG
29	BUSTAMI	S-1	20	80%	-	15	15	10	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	90	TINGGI
30	BORIS FRANS EDBERG SIMANJUNTAK	S-1	20	80%	-	15	15	10	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	90	TINGGI
31	REGAN HANFELIAN YUSA	S-1	20	80%	-	15	15	10	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	90	TINGGI
32	WIWIT ASWANDI	S-1	22	88%	-	15	15	10	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	92	SANGAT TINGGI
33	IMANIA ETIKASARI	D-III	21	84%	-	15	0	10	25	62.5 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	76	SEDANG
34	WIWIN HERWINA	D-III	21	84%	-	0	15	10	25	62.5 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	76	SEDANG
35	TANISA FITRI	D-II/D-I/SMA	20	80%	-	15	0	10	25	62.5 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	75	SEDANG
36	YUSTOM	S-2	23	92%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	93	SANGAT TINGGI
37	YULDI HERMAN	S-1	22	88%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	92	SANGAT TINGGI
38	PARLUHUTAN SIREGAR	S-1	22	88%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	92	SANGAT TINGGI
39	FEBRI ADIANSYAH	S-1	22	88%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	92	SANGAT TINGGI
40	AHMAD SOPIAN MARBUN	S-1	22	88%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	92	SANGAT TINGGI
41	YURDIAN SOYO	S-1	22	88%	-	-	0	17.5	17.5	43.75 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	69.5	RENDAH
42	ZULFIKAR	S-1	22	88%	-	-	22.5	17.5	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	92	SANGAT TINGGI
43	ERWIN HASANUDDIN	D-II/D-I/SMA	20	80%	-	-	0	17.5	17.5	43.75 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	67.5	RENDAH
44	MUHAMMAD IDRUS	D-II/D-I/SMA	20	80%	-	-	7.875	17.5	25.375	63.44 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	75.375	SEDANG
45	VIRGADIOS ARFATOS	S-2	23	92%	-	15	15	10	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	93	SANGAT TINGGI
46	EKO PRASETYO RITANTO	S-2	23	92%	-	15	15	10	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	93	SANGAT TINGGI
47	YUSNI HAFRIALDI	S-1	20	80%	-	15	0	0	15	37.5 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	65	RENDAH
48	LUFFI HIDAYAT HASIBUAN	S-1	20	80%	-	15	0	10	25	62.5 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	75	SEDANG
49	AZWAN NASUTION	S-1	20	80%	-	15	15	10	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	90	TINGGI
50	YUNIKA MARIANI SIREGAR	S-1	20	80%	-	15	15	10	40	100%	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	90	TINGGI
51	RIZA KURNIA	D-II/D-I/SMA	20	80%	-	15	0	10	25	62.5 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100%	75	SEDANG

Pada tahun 2023, capaian ISK 5.1.5: “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” mengalami keberhasilan pencapaian target, dengan perolehan nilai indeks sebesar 84,39. Dibandingkan dengan pencapaian nilai indeks profesionalitas ASN pada tahun 2022, mengalami peningkatan capaian. Pangkalan PSDKP Lampulo terus mengupayakan perbaikan kinerja, dengan terus mendorong pegawai dalam meningkatkan kemampuan, baik teknis maupun manajerial melalui keikutsertaan dalam bimbingan teknis, pelatihan, dan seminar secara daring dan luring.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.5 sebesar Rp 527.372.000,00. Sampai dengan tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 527.371.400,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.6: “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo”

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun Ijen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh Kemenpan RB.

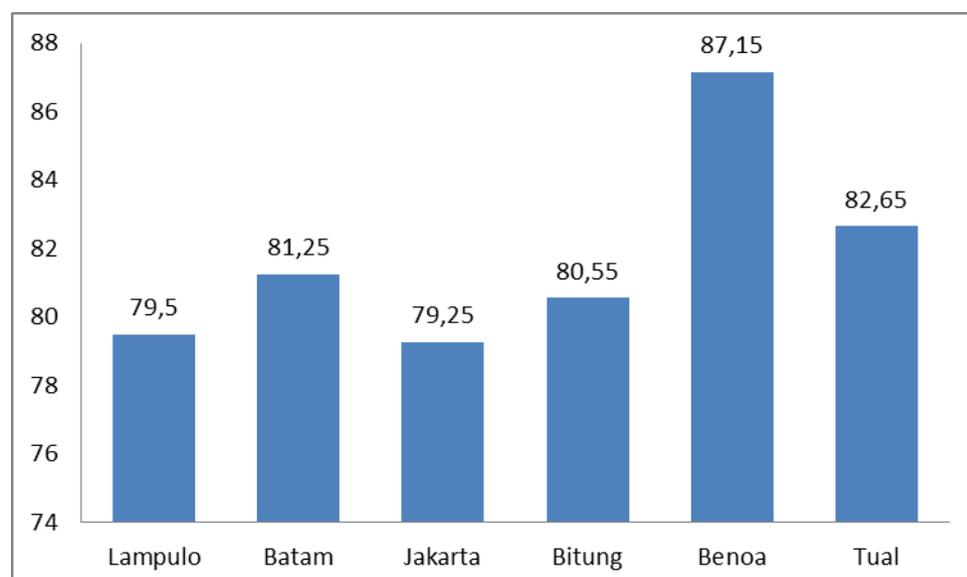
Capaian ISK 5.1.6. “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.36. Hasil Capaian ISK 5.1.6: “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo	80,05	79,50	99,31%

Pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK 5.1.6 “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo” dengan nilai sebesar 80,05, telah tercapai nilai sebesar 79,50, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 99,31%.

ISK 5.1.6: “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo”, merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan tahun sebelumnya, juga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN. ISK 5.1.6: “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo”, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Adapun rincian perolehan penilaian mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel berikut:

PM SAKIP 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot (%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00		25.20
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00		24.00
3	PELAPORAN KINERJA	15.00		11.55
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00		18.75
TOTAL		100.00		79.50
PREDIKAT				88

NO	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot (%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25.20	84.00%
1.a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	6.30	70.00%
1.c	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	13.50	90.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.00	80.00%
2.a	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	8.10	90.00%
2.c	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, setelah penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	10.50	70.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	11.55	77.00%
3.a	Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	3.00	2.70	90.00%
3.b	Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	3.60	80.00%
3.c	apelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	5.25	70.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	18.75	75.00%
4.a	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.75	90.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	7.50	60.00%

Capaian ISK 5.1.6: “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo”, pada tahun 2023 tidak dapat memenuhi target. Adapun kendala yang dialami, adalah kurangnya koordinasi antara pihak pengelola kinerja dengan tim humas Pangkalan PSDKP Lampulo dalam hal pengunggahan dokumen kinerja pada website Pangkalan PSDKP Lampulo, sehingga dokumen kinerja yang terunggah tidak tepat waktu. Pangkalan PSDKP Lampulo terus melakukan perbaikan, dengan meningkatkan koordinasi, monitoring, evaluasi, serta meningkatkan tertib administrasi terkait dokumen kinerja agar dapat terunggah tepat waktu pada website Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.6 sebesar Rp 83.000.000,00. Sampai dengan tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 82.964.431. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,96%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.7: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”

Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2020 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2021 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Capaian ISK 5.1.7. “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” pada Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.37. Hasil Capaian ISK 5.1.7: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN	PERSEN
Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75%	TW I	120%
		75%	
		TW II	
		75%	
		TW III	
		TW IV	
		100%	

Pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK 5.1.7: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

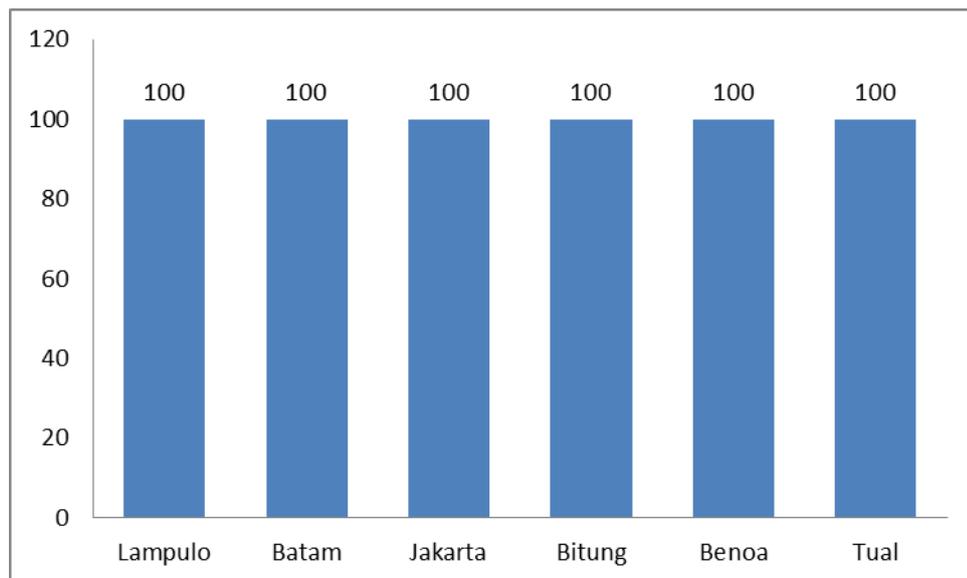
yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” sebesar 75%, telah tercapai sebesar 100%, sehingga persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 120%.

ISK 5.1.7: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

Capaian ISK 5.1.7: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” pada tahun 2023, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan		
Perbandingan	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	70%	75%
Capaian	100%	100%
% Realisasi	120%	120%

Capaian ISK 5.1.7: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” pada tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Pada tahun 2023, capaian pada ISK 5.1.7: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah

Dilengkapi dan Disampaikan” adalah 100%. Hal ini diraih sesuai dengan Surat dari Sesditjen PSDKP Nomor: B.157/PSDKP.1/TU.140/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penyampaian Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” lingkup Ditjen PSDKP Triwulan IV Tahun 2023, dengan rincian sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi, telah tuntas ditindaklanjuti 100%.

Tindak lanjut yang dipenuhi Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pemenuhan capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja diantaranya:

1. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 3,906 dari skala 5,000 dengan kategori B (Baik). Tindak lanjut: Telah dilakukan peninjauan ulang SP melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2023 dengan melibatkan media masa tanggal 14 September 2023 Nomor: B.1062/PSDKPLan.1/TU.220/IX/2023 dengan melibatkan media masa Antara.
2. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 3,906 dari skala 5,000 dengan kategori B (Baik). Tindak lanjut: Telah terdapat bukti publikasi atas *service delivery*, hasil SKM, dan rekap hasil konsultasi dan pengaduan.
3. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 3,906 dari skala 5,000 dengan kategori B (Baik). Tindak lanjut: Telah terdapat tindak lanjut rekomendasi SKM Tahun 2023 berupa perbaikan sarana dan prasarana dan pendampingan aplikasi pelayanan.
4. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 3,906 dari skala 5,000 dengan kategori B (Baik). Tindak lanjut: Telah terdapat kebijakan waktu istirahat dan tambahan waktu layanan pada SP yang ditetapkan pada memorandum Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo nomor: B.9/PSDKPLan.1/TU.210/IX/2023.
5. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 3,906 dari skala 5,000 dengan kategori B (Baik). Tindak lanjut: Telah terdapat kode etik yang menambahkan unsur hak bagi petugas layanan berupa memorandum Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo nomor: B.7/PSDKPLan.1/TU.210/VIII/2023.
6. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 3,906 dari skala 5,000 dengan kategori B (Baik). Tindak lanjut: Pengajuan

usulan anggaran peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik kepada Sekretaris Ditjen PSDKP nomor: B.1082/PSDKPLan.1/KU.520/IX/2023.

7. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 3,906 dari skala 5,000 dengan kategori B (Baik). Tindak lanjut: Telah terdapat bukti pemutakhiran pelayanan public berupa tangkap layer WAG PADA MANIS dengan pelaku usaha secara harian dan Mingguan.

Capaian ISK 5.1.7: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” mengalami keberhasilan pencapaian target. Dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2022, target dan capaian Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami peningkatan target, namun capaian memiliki kesamaan, yaitu 100%. Faktor yang mendukung tercapainya target pada ISK 5.1.7, yaitu: Kegiatan pelayanan publik Pangkalan PSDKP Lampulo mendapatkan dukungan penuh dalam mencapai nilai indeks Pelayanan Publik (IPP) pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2023. Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo selaku Pembina pelayanan public telah berkolaborasi dengan Eselon 1 Ditjen PSDKP dalam peningkatan sarana dan prasarana, peninjauan Standar Pelayanan, publikasi, tindak lanjut Standar Kepuasan Masyarakat (SKM TW III 2023), kebijakan waktu istirahat melalui memorandum, dan pemutakhiran pelayanan berupa inovasi pelayanan,

Kendala yang dialami dalam pencapaian target pada ISK 5.1.7 antara lain: Terbatasnya anggaran dalam pembangunan fisik pada tahun 2023 sehingga membutuhkan eskalasi permohonan ke Eselon 1, dengan mengoptimalkan anggaran perawatan Gedung dan bangunan tahun 2023. Dinamika perubahan kebijakan penyempurnaan inovasi pelayanan menggunakan aplikasi terpusat berupa e-SLO sehingga penerima layanan kembali menyesuaikan media pelayanan yang terbaru.

Faktor yang dapat menunjang pencapaian target pada ISK 5.1.7, antara lain: Peran Pimpinan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan dukungan pemberi/penerima layanan yang mampu memberi masukan untuk perbaikan kualitas pelayanan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.7 sebesar Rp 60.750.000,00. Sampai dengan Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 60.750.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.8: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:

1. Tim Satker (6)
2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)
3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)
4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)
5. Upayakan Data Terkini (2)
6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)
7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)
8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)
9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)
10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)
11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)
12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)

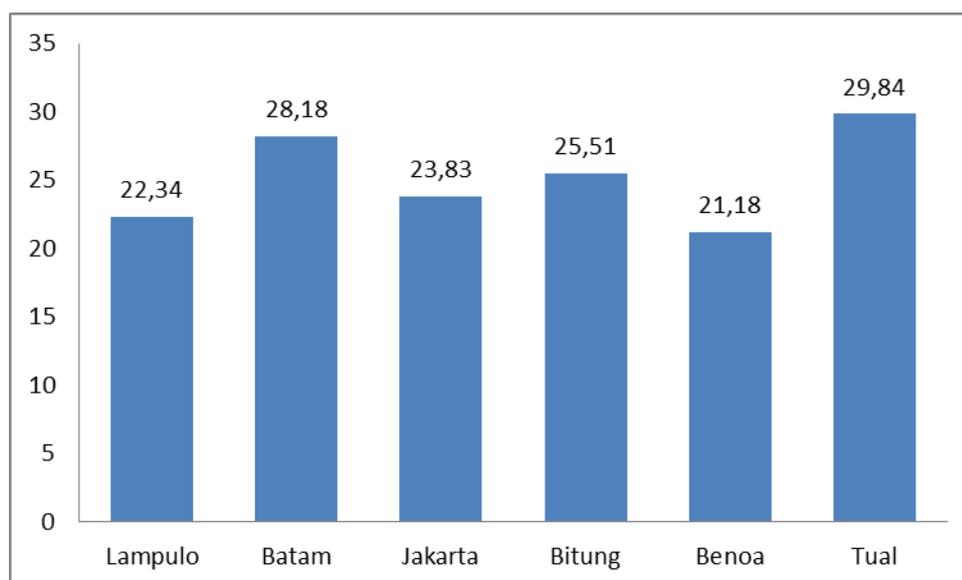
Capaian ISK 5.1.8. “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” pada tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.38. Hasil Capaian ISK 5.1.8: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	21	22,34	106,38%

ISK 5.1.8: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

Capaian ISK 5.1.8: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Capaian ISK 5.1.8: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” pada tahun 2023, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja		
Perbandingan	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	21	21
Capaian	21,68	22,34
% Realisasi	103,24%	106,38%

Kegiatan Budaya Kerja di Pangkalan PSDKP Lampulo telah dilaksanakan dengan menggunakan panduan yang telah ditentukan oleh Lembar Kerja Evaluasi. Adapun 11 (Sebelas) budaya kerja di implementasikan dengan:

- a.) HIU (Hasilkan Inovasi Unit) dengan Tim Gugus Kerja Transformasi mengikuti inovasi pelayanan publik yang dilombakan di eselon I PSDKP dengan nama LDR “Lampulo Damai Ramai”
- b.) Hadir 5 (Lima) Menit sebelum Kegiatan, dituangkan dalam surat-surat yang diterbitkan Pangkalan PSDKP Lampulo khususnya terkait undangan acara dan permohonan narasumber telah menyertakan himbauan untuk hadir 5 menit sebelum kegiatan;
- c.) 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) dengan melakukan implementasi berupa memasang *leaflet* disetiap ruangan kerja, kegiatan Jumat bersih dengan bergotong royong, public caimpaint dengan media sosial, dan kegiatan bersih pantai dalam rangka Bulan Cinta Laut (BCL) tahun 2023;

- d.) UPDATE (Upayakan data terkini) dengan memastikan setiap Pimpinan dan perwakilan staff untuk diunggah pada Aplikasi Coofis secara kontinyu setiap melakukan kegiatan selain diunggah di media sosial PSDKP Lampulo;
- e.) ORCA (Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan) dengan implementasi setiap rapat yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Lampulo baik internal ataupun dengan eksternal, membuat notulensi agar ketelusuran hasil dari rapat di dokumentasikan dengan baik;
- f.) TAAT (Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan) dengan nilai penerapan reformasi Birokrasi di Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah memenuhi nilai 88,83% pada Lembar Kerja Mandiri tahun 2023 sesuai dengan Surat Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo nomor: B.121/PSDKP.Lan1/TU.140/I/2024 Tanggal 17 Januari 2024 hal Penyampaian laporan hasil penilaian mandiri LKE Pembangunan Zona Integritas 2023
- g.) BARRAKUDA (Belanjakan Barang Secara Realistis Akuntabel dan Amanah) dengan cara memantau penyerapan anggaran secara bertahap untuk mencapai penyerapan anggaran dan optimal dan akuntabel selama tahun 2023;
- h.) APIK (ASN PSDKP Produktif Kerja) dengan menggunakan media sosial Pimpinan selalu mengingatkan terkait informasi pekerjaan selain melalui apel pagi yang juga terus dilakukan;
- i.) MANTAP (Menyelesaikan Tugas dengan Tepat) dengan cara penyelesaian tugas dari laporan perjalanan dinas tepat waktu, laporan kinerja akuntabel dan tepat waktu dan penyelesaian temuan Itjen tuntas pada tahun 2023;
- j.) HARMONIS (Hargai, Motivasi, dan Inisiatif) dengan memberi apresiasi kepada pegawai (PNS/PPNPN) melalui dinding apresiasi yang dilakukan tahun 2023 oleh Sesditjen PSDKP yang diikuti oleh sebagian besar oleh pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo; dan
- k.) GO GREEN (Gelorakan Gerakan Hemat Energi) dengan melakukan himbauan berupa *leaflet*, penggunaan kertas bekas dalam draft surat menyurat, dan menggunakan gelas minuman yang dibawa masing-masing pegawai untuk mengurangi limbah plastik.

Capaian ISK 5.1.8: “Nilai Implementasi Program Budaya kerja”, keberhasilan pencapaian target, yaitu 22,34 dari target nilai 21. Dibandingkan dengan target pada tahun 2022, terdapat kesamaan nilai target, yaitu 21. Namun, pencapaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Penurunan capaian pada tahun 2023 disebabkan karena:

1. Sebagian besar pegawai melaksanakan penugasan dengan fokus, efektif, dan efisien yang menjadi penurunan dibanding 2022; dan
2. Jarang menggunakan kertas bekas dalam memproses draft dokumen menjadi penurunan dibanding 2022.

Faktor yang dapat menunjang pencapaian “Nilai Implementasi Program Budaya kerja” pada tahun berikutnya adalah:

1. Tim gugus kerja transformasi 2023 telah melibatkan sebagian besar pegawai yang menjadi peningkatan dibandingkan 2022;
2. Sekretariat PSDKP Lampulo telah melaksanakan seluruh tugas (Dinding Apresiasi, LKE, Survey, kesekretariatan lainnya) yang menjadi peningkatan dibandingkan 2022;
3. Sebagian besar aspek Program Budaya Kerja telah dimonitoring dan dievaluasi oleh Sekretariat dan Fasilitator yang menjadi peningkatan dibandingkan 2022;
4. Hasil sumbang Saran digunakan oleh Unit Kerja tapi tidak digunakan Unit Kerja lain yang menjadi peningkatan dibandingkan 2022;
5. Panduan kerapian dan kebersihan sebagian kecil tempat kerja telah ditampilkan yang menjadi penurunan dibandingkan 2022;
6. Seluruh pegawai telah mengaktifkan akun *Colaboration Office* yang menjadi peningkatan dibanding 2022;
7. Sebagian besar pegawai memposting aktivitas kerja nya setiap hari menjadi peningkatan dibanding 2022; dan
8. Seluruh pegawai menggunakan aplikasi menjadi peningkatan dibanding 2022;
9. Seluruh pegawai berpartisipasi pada kegiatan Dinding Apresiasi menjadi peningkatan dibanding 2022.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.8 sebesar Rp. 17.000.000,00. Sampai dengan tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 16.999.177,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.9: “Inovasi yang Dihasilkan”

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu

pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara.

Adapun Kriteria Inovasi, antara lain: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Kelompok inovasi diategorikan: umum, khusus. Rincian Aspek Penilaian Kelompok Inovasi, sebagai berikut:

- Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)
- Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)

Persyaratan dalam penilaian inovasi, antara lain:

- memenuhi seluruh kriteria inovasi;
- selaras dengan tema kompetisi;
- relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung;
- menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan

Capaian ISK 5.1.9. “Inovasi yang Dihasilkan” pada Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

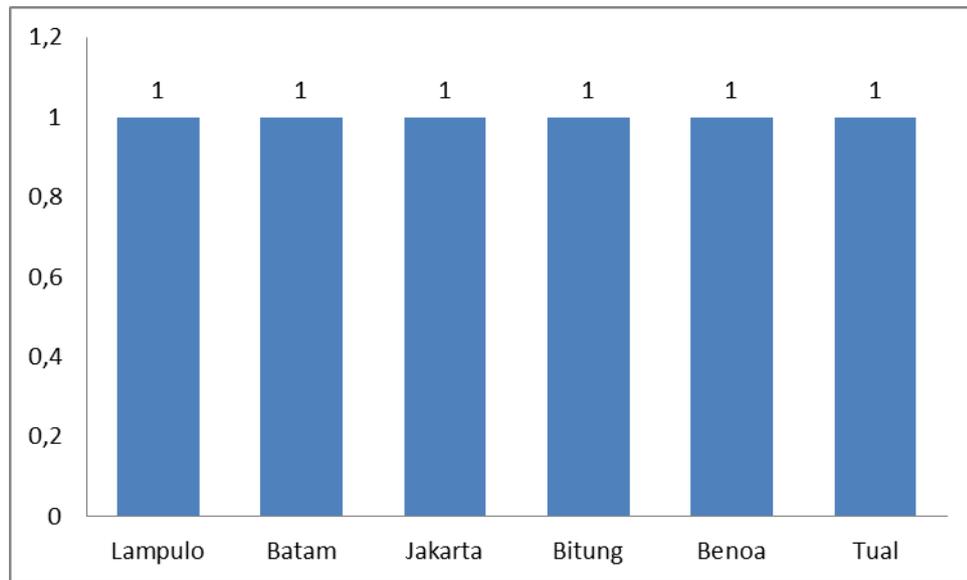
Tabel 3.39. Hasil Capaian ISK 5.1.9: “Inovasi yang Dihasilkan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Inovasi yang Dihasilkan	1	1	1

ISK 5.1.9: “Inovasi yang Dihasilkan” merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

Capaian ISK 5.1.9: “Inovasi yang Dihasilkan” merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

Capaian ISK 5.1.9: “Inovasi yang Dihasilkan” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Capaian ISK 5.1.9: “Inovasi yang Dihasilkan” pada tahun 2023, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Jumlah Inovasi yang Dihasilkan		
Perbandingan	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	1	1
Capaian	1	1
% Realisasi	100%	100%

Pada tahun 2023, Pangkalan PSKDP Lampulo menghasilkan inovasi terkait dengan pelayanan publik dengan judul LDR (Lampulo Damai Ramai). Inovasi tersebut sangat membantu bagi penerima layanan dalam mengajukan permohonan layanan SLO, HPK Keberangkatan, dan HPK Kedatangan dengan pengisian yang sebelumnya manual, menjadi via google form sehingga dapat mempersingkat waktu, tenaga, dan biaya.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.9 sebesar Rp. 17.000.000,00. Sampai dengan tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 17.000.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.10: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi,

menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Capaian ISK 5.1.10. “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.40. Hasil Capaian ISK 5.1.10: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			
	T	TW	C	%
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	92	TW I	TW I	TW I
		92	92,59	100,64%
		TW II	TW II	TW II
		92	92,59	100,64%
		TW III	TW III	TW III
		92	102,78	111,72%
		TW IV	TW IV	TW IV
	92	121,67	120%	
Rata-rata Nilai MP Tahun 2023 = 102,68		% Target 2023 = 111,61%		

Pada Tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK 5.1.10: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 92%, telah tercapai 102,78%, maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 111,72%. Tercapainya pemenuhan target pada indikator kinerja ini ditunjang oleh pegawai yang aktif melakukan posting berita pada Aplikasi Bitrix24 dengan memperhatikan kaidah 5W+1H.

Capaian ISK 5.1.10: “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” tahun 2023, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.41. Perbandingan Target RPJMN pada IK “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

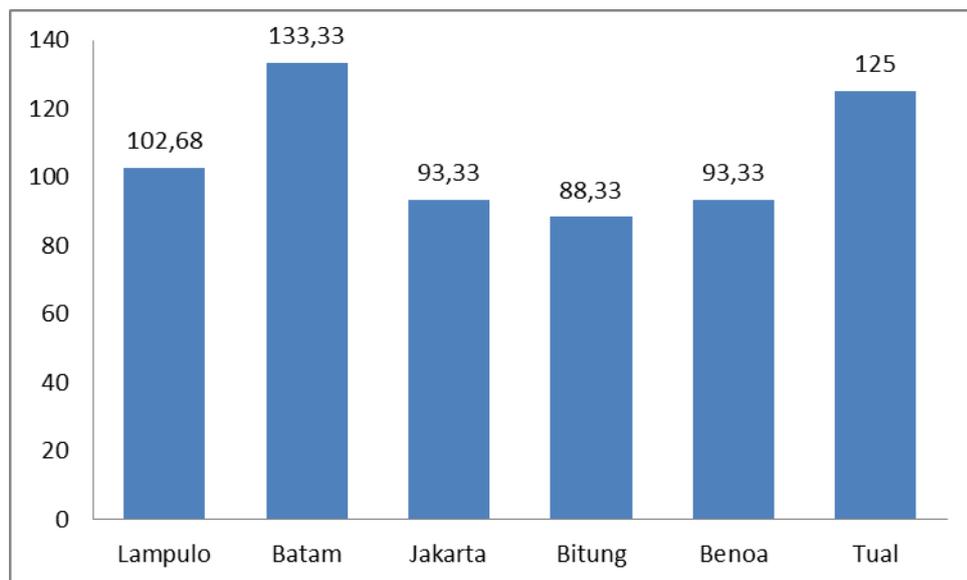
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2023	REALISASI 2023
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	84	86	88	90	92	102,68

Capaian ISK 5.1.10: “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” tahun 2023, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.42. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo				
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	82	84	84	92
Capaian	77,70	100	96,60	102,68
% Realisasi	76,63%	110,05%	112,33%	111,61%

Capaian ISK 5.1.10: “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Capaian ISK 5.1.10: “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” tahun 2023 lingkup UPT PSDKP, disajikan pada tabel berikut:

No	UPT PSDKP	Target Tw III	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Realisasi Tw III	Realisasi Tw IV	Rata-rata
1	Jakarta	92%	100%	92.59%	100.00%	93.33%	96.48%
2	Bitung	92%	100%	92.59%	100.00%	88.33%	95.23%
3	Lampulo	92%	92,59%	92.59%	102.78%	121.67%	102.98%
4	Batam	92%	100%	92.59%	94.44%	133.33%	105.09%
5	Benoa	92%	85,19%	100.00%	105.56%	93.33%	96.02%
7	Tual	92%	91,11%	99.26%	116.67%	125.00%	108.01%
6	Belawan	92%	85,11%	100.00%	101.85%	123.33%	102.59%
8	Pontianak	92%	97,04%	98.52%	93.52%	85.00%	93.52%
9	Tarakan	92%	100%	94.07%	100.00%	8.33%	75.60%
10	Cilacap	92%	80,74%	100.00%	107.41%	108.33%	99.12%
11	Kupang	92%	73,33%	92.59%	122.22%	133.33%	105.37%
12	Ambon	92%	82,22%	100.00%	94.44%	121.67%	99.58%
13	Tahuna	92%	98,52%	100.00%	122.22%	120.00%	110.19%
14	Biak	92%	91,11%	100.00%	96.30%	100.00%	96.85%

Pada Tahun 2023, target ISK 5.1.10 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 92, diperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 102,68%, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 111,61%. Keberhasilan pemenuhan target dikarenakan hasil usaha dari Pangkalan PSDKP Lampulo dalam memberikan informasi rutin pada Aplikasi Colaboration Office melalui laman <http://portal.kkp.go.id> dengan memenuhi kaidah 5W+1H.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.10 sebesar Rp 130.353.000. Sampai dengan Tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 130.348.955,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.11: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022;

- 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- 3). Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;
- 4). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- 5). Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Capaian ISK 5.1.11. “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.43. Hasil Capaian ISK 5.1.11: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	77,5	100	120%

Capaian ISK 5.1.11: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.44. Perbandingan Target RPJMN pada ISK 5.1.1: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

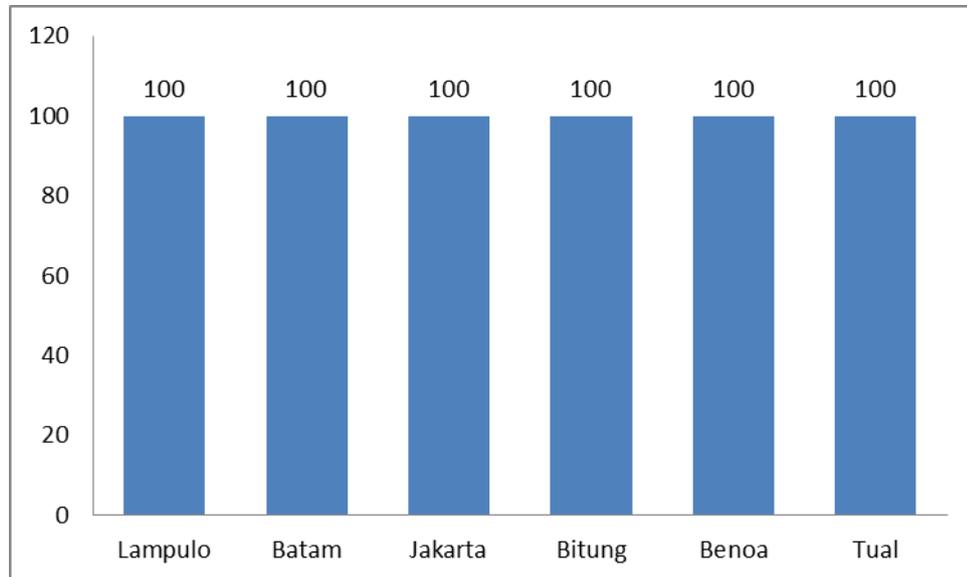
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2023	REALISASI 2023
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	72,5	72,15	72,25	75,35	77,5	100

Capaian ISK 5.1.11: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.45. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo				
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	-	72,50	75	77,5
Capaian	-	95	100	100
% Realisasi	-	120%	120%	120%

Capaian ISK 5.1.11: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Kegiatan pengukuran kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo diperoleh berdasarkan pemanfaatan BMN secara optimal, dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara kontiniu terkait pengelolaan BMN. Selain itu Operator BMN dan Persediaan Pangkalan PSDKP Lampulo terus menerus melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Aceh atau pihak KPKNL lainnya dalam wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo terkait pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.11 sebesar Rp 941.636.120,00 Sampai dengan tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 941.636.120,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.12: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);

- 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Capaian ISK 5.1.12. “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.46. Hasil Capaian ISK 5.1.12: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	77,5	98,75	120%

Capaian pada ISK 5.1.12: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.47. Perbandingan Target RPJMN pada ISK 5.1.12: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

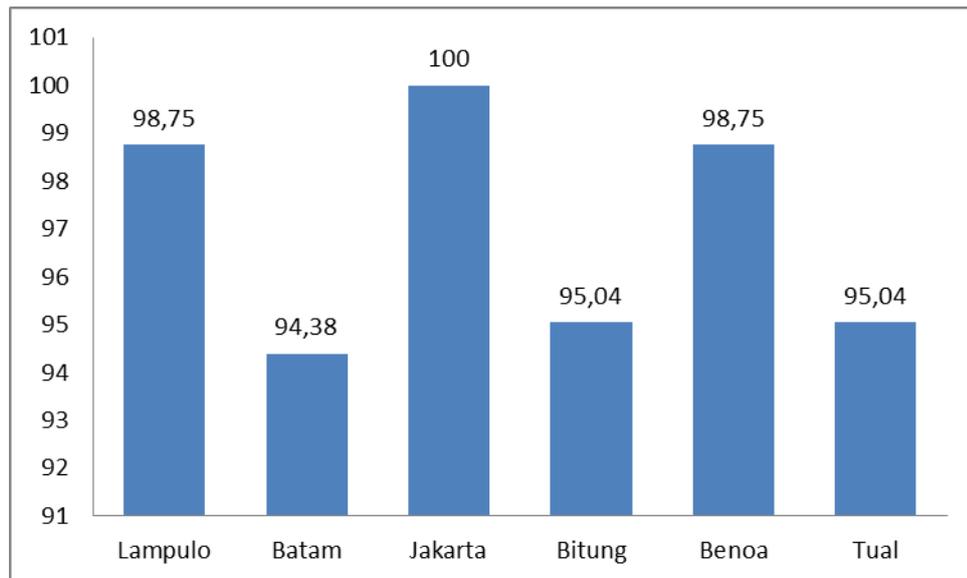
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2023	REALISASI 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	72,5	72,15	72,25	75,35	77,5	98,75

Capaian pada ISK 5.1.12: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.48. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada ISK 5.1.12: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo				
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	-	72,50	75	77,5
Capaian	-	100	83,75	98,75
% Realisasi	-	120%	111,67%	120%

Capaian pada ISK 5.1.12: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Capaian ISK 5.1.12 dapat memenuhi target dikarenakan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo telah memenuhi standar yang dinilai. Terdapat 6 (enam) Aspek Pengukuran Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2.) Perencanaan dan Persiapan;
- 3.) Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan;
- 4.) Kesesuaian Tahap Pelaksanaan;
- 5.) Laporan Penyelenggaraan PBJ; dan
- 6.) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa.

Program yang menunjang keberhasilan tercapainya IK pada tahun 2022 dengan Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan monitoring dan evaluasi terkait proses pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Selain itu, pihak penyedia barang/jasa telah melaksanakan pengadaan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Pangkalan PSDKP Lampulo juga melaksanakan kewajiban administrasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang termuat dalam <http://lpse.kkp.go.id> mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga selesai kegiatan pengadaan barang/jasa, termasuk pelaporan monitoring dan evaluasinya. Faktor lain yang mendukung keberhasilan pencapaian ISK 5.1.12, Pangkalan PSDKP Lampulo aktif melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Inspektorat Jenderal KKP pada masa pra pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, sehingga tingkat

kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo mendapatkan nilai yang optimal.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.12 sebesar Rp 99.447.000,00. Sampai dengan tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 99.446.100,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,99%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.13: “Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target IKPA Tahun 2023 ditentukan nilai sebesar 89.00 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA > 95 ;
- c. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Pemenuhan Konversi Bobot Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dapat dikategorikan:

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Capaian ISK 5.1.13. “Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.49. Hasil Capaian ISK 5.1.13: “Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93,75	93,52	99,75%

Capaian ISK 5.1.13. “Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.50. Perbandingan Target RPJMN pada ISK 5.1.13 “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

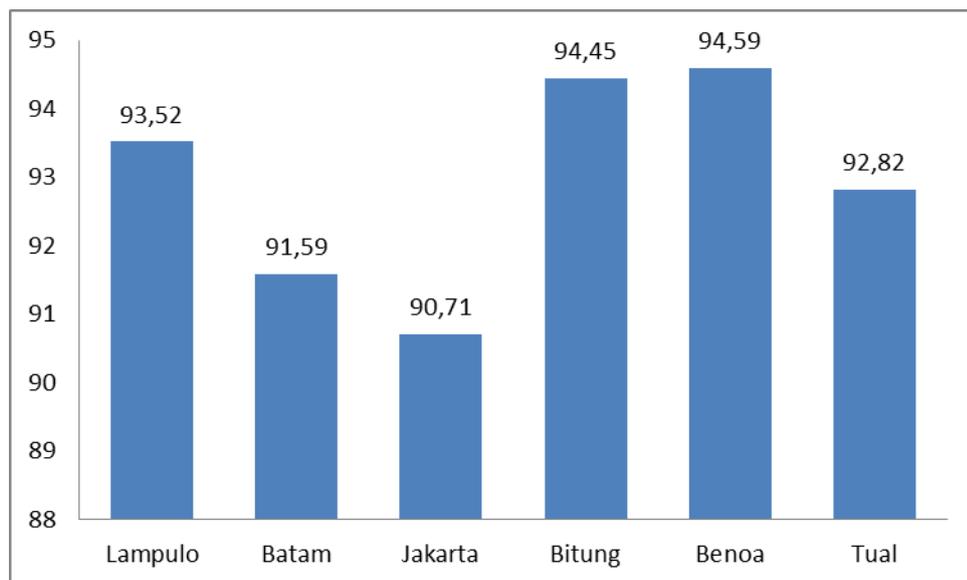
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2023	REALISASI 2023
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	89	89	90	90	93,75	93,52

Capaian ISK 5.1.13. “Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.51. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo				
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	88	89	89	93,75
Capaian	82,6	90,78	95,27	93,52
% Realisasi	93,25%	102%	107,04%	99,75%

Capaian ISK 5.1.13. “Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada ISK 5.1.13: “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran” dengan nilai sebesar 93,75. Sampai dengan Desember tahun 2023, tercapai nilai sebesar 93,52 sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 99,75%. Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mencapai target pada ISK 5.1.13 mengalami kegagalan.

Adapun rincian perolehan nilai IKPA Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Aspek	Keterangan	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	Revisi DIPA	100.00	10	10.00	77.79
	Deviasi Halaman III DIPA	55.57	10	5.56	
KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN	Penyerapan anggaran	100.00	20	20.00	94.42
	Belanja kontraktual	98.50	10	9.85	
	Penyelesaian Tagihan	100.00	10	10.00	
	Pengelolaan UP dan TUP	88.62	10	8.86	
	Dispensasi SPM	85.00	5	4.25	
KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	Capaian output	100.00	25.00	25.00	100.00
Nilai Total			Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total / Konversi Bobot)	
93.52			100%	93.52	

Berdasarkan pencapaian nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2023, terdapat 4 (empat) komponen yang pencapaiannya tidak maksimal, dengan justifikasi sebagai berikut:

- 1.) Deviasi Halaman III DIPA, ditentukan target dengan bobot 10, diperoleh nilai akhir sebesar 5,56 dikarenakan penyerapan anggaran tidak mengacu pada perencanaan sehingga menimbulkan deviasi yang cukup besar. Langkah perbaikan yang dilakukan adalah lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada satker pangkalan psdkp lampulo.
- 2.) Belanja Kontraktual, ditentukan target dengan bobot 10, diperoleh nilai akhir sebesar 9,85 dikarenakan terdapat penyampaian data kontrak belanja modal (53) dilaporkan pada periode Tw II sehingga nilai kinerja akselerasi belanja 53 pada bulan April 2024 sebesar 28,50 dari nilai maksimal 30 . Langkah perbaikan yang dilakukan adalah Tim PPK senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan tepat waktu dalam penyampaian data kontrak dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontrak yang akan disampaikan ke KPPN.
- 3.) Pengelolaan UP dan TUP, ditentukan target dengan bobot 10, diperoleh nilai akhir sebesar 8,86 dikarenakan terdapat penyelesaian GUP yang melebihi waktu sesuai ketentuan yaitu 30 hari kalender. Langkah perbaikan yang dilakukan adalah

memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

- 4.) Dispensasi SPM, ditentukan target dengan bobot 5, diperoleh nilai akhir 4,25 dikarenakan adanya tagihan belanja pegawai yang mengalami keterlambatan sehingga diajukan dispensasi yang mengakibatkan nilai berkurang. Langkah perbaikan yang dilakukan adalah senantiasa memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana, menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran serta menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun dengan berpedoman pada penyelesaian Langkah-langkah akhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.13 sebesar Rp 70.640.000,00. Sampai dengan tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 70.639.797,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,99%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

ISK 5.1.14: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi:

- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah

Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA, sebagai berikut:

- a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)
 - b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan
- Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4

(empat), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Capaian ISK 5.1.14. “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.52. Hasil Capaian ISK 5.1.14: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	82	84,96	103,61%

Capaian pada ISK 5.1.14: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.53. Perbandingan Target RPJMN pada ISK 5.1.14: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

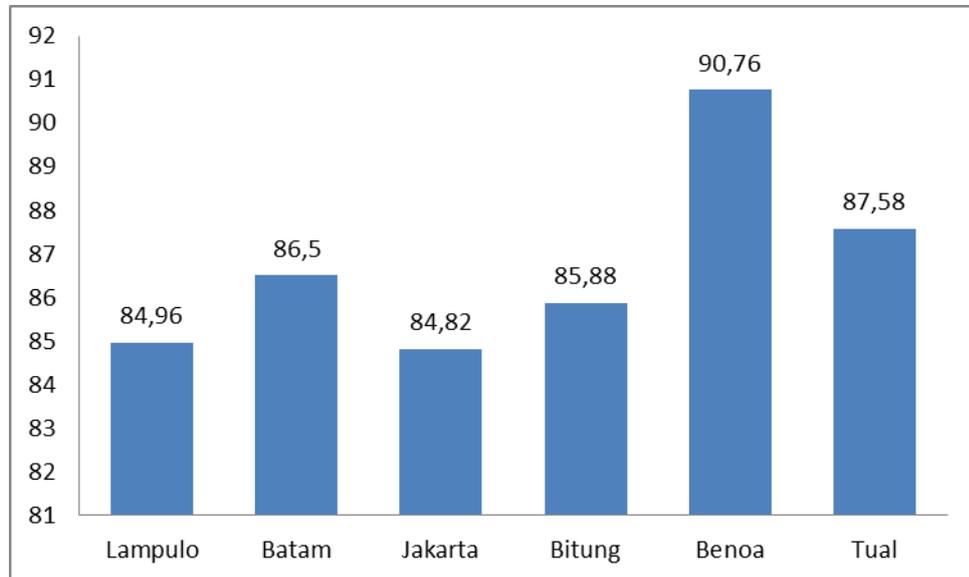
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2023	REALISASI 2022
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	86	87	88	89	82	84,96

Capaian pada ISK 5.1.14: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.54. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada ISK 5.1.14: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo				
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	-	86	81	82
Capaian	-	90,49	91,52	84,96
% Realisasi	-	105,22%	112,62%	103,61%

Capaian pada ISK 5.1.14: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2023, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya ISK 5.1.14 sebesar Rp 11.737.963.000,00. Sampai dengan tahun 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 11.705.087.785,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,71%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2023 sebesar Rp 27.808.540.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 27.759.675.417 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah). Persentase realisasi anggaran diperoleh sebesar 99,82%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAKTI.

Rincian realisasi anggaran dan perkembangan realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.55. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2350	Pemantauan dan Operasi Armada	12.409.655.000	12.398.154.344	99,91%
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	491.600.000	491.565.462	99,99%
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	616.894.000	615.555.392	99,78%
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	578.540.000	575.500.755	99,47%
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	13.711.851.000	13.678.899.464	99,76%
Jumlah		27.808.540.000	27.759.675.417	99,82%

Efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo pada Aplikasi SMART E-Monev DJA sebesar 50,44. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan anggaran telah efisien, dengan target yang dapat tercapai. Sebagai bentuk efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pengawasan SDKP memeriksa lebih dari satu pelaku usaha sehingga capaian output dapat mencapai target, serta penggunaan SDM dan anggaran menjadi efektif. Selain itu, dalam kegiatan penerapan sanksi administratif, Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan ekspose secara daring, sehingga lebih menghemat pengeluaran anggaran akomodasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penyusunan Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Lampulo berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Ditjen. PSDKP telah menetapkan 13 Indikator Kinerja Utama dan 14 Indikator Kinerja Manajerial pada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang melekat pada 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Tahun 2023 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama Tahun 2023, sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2023, sebagai upaya peningkatan kinerja berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2023

No.	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Perlu meningkatkan ketelitian dalam pengukuran kinerja tiap triwulan	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Teknis terkait pengukuran indikator kinerja tiap triwulan, serta melakukan validasi data dukung capaian kinerja
2.	Perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap bulan, pada data capaian kinerja yang bersifat dinamis	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara kontinyu setiap bulannya, terutama pada data kinerja yang bersifat dinamis, agar pada saat pengukuran, data telah terkunci dan tervalidasi dengan Direktorat Teknis
3.	Perlu menyiapkan dan mengarsipkan dokumen kinerja dengan baik, serta mengunggah pada website Pangkalan PSDKP Lampulo sebagai bukti keterbukaan informasi publik.	Melakukan perbaikan dalam penyusunan dan pengarsipan dokumen kinerja, serta melakukan kerjasama yang baik dengan pihak Humas Pangkalan PSDKP Lampulo agar dokumen kinerja yang diunggah tidak melewati batas waktu yang ditentukan.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
(AWAL TAHUN)

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
(REVISI DESEMBER)

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
(AWAL TAHUN)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Akhmadon**
Jabatan : Kepala Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo

Adin Nurawaluddin

Akhmadon

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA, DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6
		ISK1.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK1.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan (%)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	ISK3.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan	ISK4.1.1	Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (%)	80
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	ISK4.2.1	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (%)	93
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	75

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		ISK5.1.4 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
		ISK5.1.5 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	78
		ISK5.1.6 Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	90
		ISK5.1.7 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		ISK5.1.8 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21
		ISK5.1.9 Jumlah inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Lampulo (inovasi)	1
		ISK5.1.10 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	92
		ISK5.1.11 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	77,5
		ISK5.1.12 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	77,5
		ISK5.1.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	89
		ISK5.1.14 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	547.633.000
SK1.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	895.509.000
SK2.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	9.429.397.000
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK3.2	<i>Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP yang efektif</i>	
SK3.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	519.534.000
SK4.1	<i>Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11.233.165.000
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen. PSDKP</i>	
Total Anggaran		22.625.238.000

Jakarta, 17 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo

Adin Nurawaluddin**Akhmadon**

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
(REVISI DESEMBER)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.dipsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sahono Budianto**
Jabatan : Kepala Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Desember 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo


Adin Nurawaluddin


Sahono Budianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1.1	Terselenggaranya Pengawasan Sistem Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	ISK1.1.1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	80
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	ISK1.2.1	Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas (Indeks)	87,6
		ISK1.2.2	Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas (Indeks)	87,6
		ISK1.2.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK1.3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	ISK1.3.1	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK2.1	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	ISK2.1.1	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	100
SK2.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	ISK.2.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK3.1	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	ISK3.1.1	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	100
SK3.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	ISK3.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	ISK4.1.1	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
		ISK4.1.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
		ISK4.1.3	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	80
SK4.2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	ISK4.2.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93

“ bekerja dengan integritas dan totalitas ”

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	75
		ISK5.1.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
		ISK5.1.5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	78
		ISK5.1.6	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	80,05
		ISK5.1.7	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		ISK5.1.8	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21
		ISK5.1.9	Inovasi yang Dihasilkan (Inovasi)	1
		ISK5.1.10	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	92
		ISK5.1.11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	77,5
		ISK5.1.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	77,5
		ISK5.1.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	93,75
		ISK5.1.14	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	12.409.655.000
SK1.1	<i>Terselenggaranya Pengawasan Sistem Berbasis Masyarakat yang Partisipatif</i>	
SK1.2	<i>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif</i>	
SK1.3	<i>Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	616.894.000
SK2.1	<i>Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan</i>	
SK2.2	<i>Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan</i>	
Kegiatan 3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	578.540.000
SK3.1	<i>Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan</i>	
SK3.2	<i>Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	491.600.000
SK4.1	<i>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas</i>	
SK4.2	<i>Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	13.711.851.000
SK5.1	<i>Tata Kelola Pemerintah yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP</i>	
Total Anggaran		27.808.540.000

Jakarta, 5 Desember 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo


Adin Nurawaluddin


Sahono Budianto

LAMPIRAN

RENCANA
STRATEGIS
TAHUN 2020 – 2024